

**KAJIAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN
DI KABUPATEN PRINGSEWU**



**KAJIAN PEMBERDAYAAN
EKONOMI PEREMPUAN
DI KABUPATEN PRINGSEWU**

Tim Penyusun :
Meilfyana, M.A
Dr. S. Indriyati C., M.Si
Gita Paramita Djausal, S.IP, M.B.A

PUSAT PENELITIAN SOSIAL, ANAK DAN PEREMPUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2021



KAJIAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DI KABUPATEN PRINGSEWU

Tim Penyusun :

PUSAT PENELITIAN SOSIAL, ANAK DAN PEREMPUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG

Meiliyana, M.A
Dr. S. Indriyati C., M.Si
Gita Paramita Djausal, S.IP, M.B.A

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segenap limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga kajian ini dapat terselesaikan menjadi Laporan Akhir dengan judul “Kajian Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Kabupaten Pringsewu”. Penyusun mengucapkan terimakasih kepada pihak terkait yang telah membantu dalam pengumpulan data.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap para perempuan yang mempunyai aktivitas ekonomi di Kabupaten Pringsewu. Muslimat Nahdatul Ulama sebagai organisasi keagamaan yg cukup besar, banyak berperan sebagai organisasi yang mewadahi sebagian besar aktivitas ekonomi para perempuan tersebut.

Selanjutnya agar laporan ini sempurna sebagai suatu kajian mendalam dan juga dapat bermanfaat sebagai referensi bagi pemerintah daerah dalam membuat sebuah kebijakan untuk mengelola potensi ekonomi kaum perempuan serta meningkatkan kontribusi perempuan dalam perekonomian di daerah, maka masukkan dan saran-saran dari pembaca sangatlah dibutuhkan.

Bandar Lampung, April 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Batasan Masalah	15
D. Rumusan Masalah	18
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Pustaka	22
B. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	84
A. Jenis dan Desain Penelitian	84
B. Sumber Data	87
C. Metode dan Teknik Pengumpulan Data	90
D. Metode Analisis Data	92
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	97
A. Hasil Penelitian	97
A. Pembahasan	118
BAB V PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sampai dengan akhir abad ke-20, permasalahan kemiskinan masih menjadi isu utama di seluruh dunia. Negara-negara di seluruh dunia meresponnya dengan menyepakati pertemuan pada September 2000 yang diikuti oleh 189 negara dengan mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan *Millenium Development Goals* (MDG's), dimana salah satu targetnya yang berhasil dicapai adalah mengurangi jumlah penduduk miskin hingga 50% pada tahun 2015. Selanjutnya kesepakatan tersebut diperbaharui dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan hasil pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat dan dihadiri perwakilan dari 193 negara. Pertemuan tersebut menyepakati bahwa kemiskinan menjadi “tulang punggung” dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

Bagi Indonesia sendiri kemiskinan juga masih menjadi permasalahan serius. Meskipun secara statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun, tetapi secara kumulatif masih cukup besar dan menjadi beban pembangunan. Pengukuran kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).¹

¹ <https://lampung.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjek>

Secara umum pada periode Maret 2015-September 2019 tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada Maret 2016 dan Maret 2018. Akan tetapi angka ini secara kumulatif masih cukup jauh di atas rata-rata nasional bahkan masih menempati peringkat ke-3 terbesar di Sumatera.

Gambar 1
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2015-2019



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Jumlah penduduk miskin di Lampung pada September 2019 mencapai 1,04 juta orang dengan sebagian besar terkonsentrasi di wilayah perdesaan yaitu sebanyak 13,96% sedangkan sisanya berada di wilayah perkotaan sebanyak 8,60%.

Tabel 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
di Provinsi Lampung Periode September 2018 - September 2019

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2018	230,20	9,06
Maret 2019	231,86	8,92
September 2019	224,69	8,60
Perdesaan		
September 2018	861,40	14,73
Maret 2019	831,80	14,27
September 2019	816,79	13,96
Total		
September 2018	1 091,60	13,01
Maret 2019	1 063,66	12,62
September 2019	1 041,48	12,30

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2018, Maret 2019 dan September 2019

Jika dilihat dari komposisi penduduk di Provinsi Lampung berdasarkan SP2020 mencatat dari total 9 juta lebih penduduk di Provinsi Lampung terdapat 51,25 persen laki-laki dan 48,75 persen perempuan atau terdapat rasio jenis kelamin sebesar 105, yang artinya terdapat 105 laki-laki per 100 perempuan di Provinsi Lampung.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Lampung Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	156 942	145 197	302 139
Tanggamus	331 491	308 784	640 275
Lampung Selatan	544 745	519 556	1 064 301
Lampung Timur	565 743	544 597	1 110 340
Lampung Tengah	747 237	712 808	1 460 045
Lampung Utara	322 935	310 164	633 099
Way Kanan	242 874	230 701	473 575
Tulang Bawang	222 394	207 627	430 021
Pesawaran	246 002	231 466	477 468
Pringsewu	208 763	196 703	405 466
Mesuji	117 509	110 009	227 518
Tulang Bawang Barat	146 355	139 807	286 162
Pesisir Barat	84 717	77 980	162 697
Bandar Lampung	594 292	571 774	1 166 066
Metro	84 806	83 870	168 676
LAMPUNG	4 616 805	4 391 043	9 007 848

Sumber : Sensus Penduduk 2020 BPS

Komposisi penduduk yang hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan tersebut belum diimbangi dengan kontribusi perempuan pada kegiatan ekonomi yang diukur dengan sumbangan pendapatan perempuan yang menjadi salah satu indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang tercatat baru mencapai 29,33 persen, sebagaimana dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Provinsi Lampung dan
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2018

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempuan	IDG
1.	Kota Metro	32,00	53,90	33,44	78,75
2.	Kab. Tanggamus	20,00	52,16	29,51	69,90
3.	Kab. Pesawaran	17,78	46,02	29,94	67,03
4.	Kab. Way Kanan	15,00	58,20	32,93	65,30
5.	Kab. Pesisir Barat	12,00	39,03	33,98	63,90

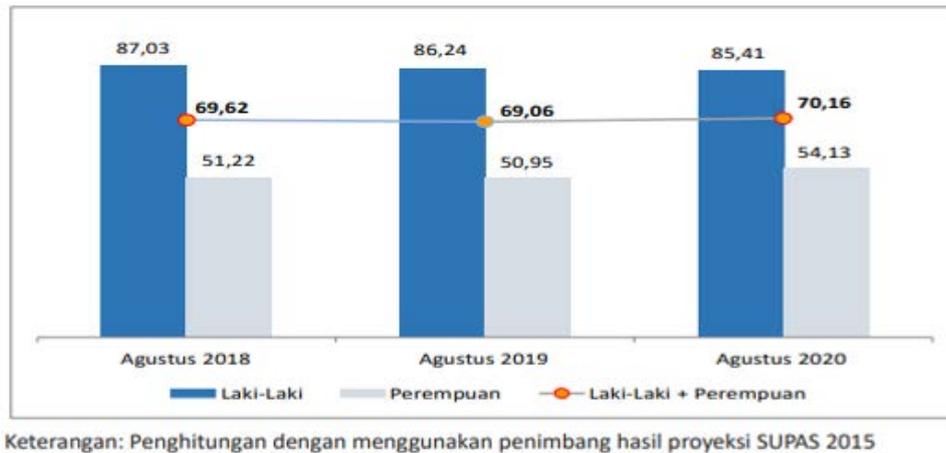
6.	Kab. Pringsewu	25,00	45,82	20,21	63,81
7.	Kab. Lampung Barat	11,76	49,35	32,53	63,84
8.	Prov. Lampung	14,12	50,48	29,33	63,82
9.	Kab. Tulang Bawang	15,56	49,80	25,94	62,52
10.	Kota Bandar Lampung	12,00	45,34	30,71	62,39
11.	Kab. Mesuji	14,29	45,90	27,28	61,71
12.	Kab. Lampung Utara	8,89	51,19	34,81	61,41
13.	Kab. Lampung Timur	10,00	54,78	32,45	60,73
14.	Kab. Tubaba	10,00	45,69	31,10	59,74
15.	Kab. Lampung Selatan	10,00	58,61	29,40	58,14
16.	Kab. Lampung Tengah	4,00	53,60	31,43	53,52

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 2020

Di sisi lain masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara partisipasi perempuan dan laki-laki dalam ketenagakerjaan, salah satu direpresentasikan oleh indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur lima belas tahun ke atas.² Indikator ini merepresentasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Kesenjangan capaian TPAK berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik berikut:

² <https://www.bps.go.id>

Gambar 2
Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Lampung, Agustus 2018 – Agustus 2020



Pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (SDG's) tujuan ke-1 “tanpa kemiskinan” terkait erat dengan tujuan ke-5 yaitu “kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan”. Dimanapun, kemiskinan selalu menampilkan wajah perempuan di depan. Banyak peneliti kontemporer mengungkapkan, dalam sebuah keluarga miskin, perempuan senantiasa sebagai katup penyelamat bagi perekonomian keluarga.

Setidaknya ada empat peran perempuan miskin dalam keluarga. *Pertama*, sebagai pengelola keuangan keluarga; *Kedua*, sebagai penanggung jawab seluruh pekerjaan domestik; *Ketiga*, sebagai pencari nafkah keluarga; *Keempat*, sebagai salah satu simpul jaringan sosial yang penting dalam hal transfer sosial, khususnya pada masa-masa kritis dan krisis³.

³ Basuki, A. & Prasetyo, Y. E., MeMusium-kan Kemiskinan, Surakarta: PATTIRO Surakarta, 2007. Hlm. 10-11

Dalam realita tak dapat dipungkiri bahwa permasalahan yang sering muncul dalam keluarga disebabkan karena faktor kebutuhan hidup yang belum sepenuhnya terpenuhi. Faktor ekonomi inilah yang kemudian menyebabkan peran yang seharusnya ditopang oleh suami harus dibantu oleh seorang istri, atau bahkan justru istri yang berperan sebagai “kepala keluarga”.

Masyarakat Indonesia mengenal istilah kepala rumah tangga atau kepala keluarga sebagai bagian dari terminologi kependudukan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kepala rumah tangga sebagai orang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga atau orang yang dianggap atau ditunjuk sebagai kepala rumah tangga.⁴ Dalam realitas di lapangan, kepala keluarga tidak selalu merujuk pada laki-laki atau suami sebab ada banyak rumah tangga yang kepala keluarganya ialah perempuan, yang disebut perempuan kepala keluarga.

Menurut Yayasan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), yang dimaksud dengan perempuan kepala keluarga ialah perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga, dan pengambil keputusan dalam keluarga.

Jika kita melihat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mengurutkan 40 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2020 terdapat 132.684

⁴ <https://www.bps.go.id>

Kepala Rumah Tangga Perempuan dari total 999.769 Kepala Rumah Tangga Miskin di Provinsi Lampung atau 13,27 persen sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4

Data Persentase Perempuan Miskin Berstatus Kepala Rumah Tangga di Provinsi Lampung Berdasarkan DTKS tahun 2020

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kepala Rumah Tangga (KRT) Miskin	KRT Perempuan	Persentase
1	Bandar Lampung	87.772	11.476	13,07%
2	Lampung Barat	33.334	2.935	8,80%
3	Lampung Selatan	146.529	20.258	13,83%
4	Lampung Tengah	131.974	19.221	14,56%
5	Lampung Timur	132.022	19.443	14,73%
6	Lampung Utara	84.216	9.907	11,76%
7	Mesuji	29.335	3.016	10,28%
8	Metro	10.843	1.368	12,62%
9	Pesawaran	65.026	7.974	12,26%
10	Pesisir Barat	20.618	1.656	8,03%
11	Pringsewu	41.272	5.690	13,79%
12	Tanggamus	87.210	9.403	10,78%
13	Tulang Bawang Barat	30.250	4.221	13,95%
14	Tulang Bawang	44.503	9.292	20,88%
15	Way Kanan	54.865	6.824	12,44%
	JUMLAH	999.769	132.684	13,27%

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2020

Perempuan kepala keluarga memikul tanggung jawab secara ekonomi bagi keluarganya, sehingga partisipasinya dalam kegiatan ekonomi menjadi satu hal yang sangat penting untuk kesejahteraan keluarganya.

Pentingnya memasukkan dimensi keadilan dan kesetaraan gender adalah adanya pengakuan tentang hambatan-hambatan struktural yang menyebabkan tidak terealisasinya hak-hak orang miskin. Salah satu hambatan struktural yang menjadi perhatian di sini adalah relasi gender (*gender relation*) yang tidak setara dan tidak adil.⁵

⁵ Darwin, Muhadjir, *Memanusiaikan Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan*, Yogyakarta: Penerbit Benang Merah. 2005 hlm. 2

Persoalan lain yang lebih mendasar terletak pada pemilahan secara dikotomis antara peran laki-laki dan perempuan yang secara kokoh dikontraskan pada peran publik dan privat. Baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis dan ajaran para ulama' pemilahan peran dan lokus secara dikotomis ini berlaku sangat ketat. Perubahan peran perempuan masuk ke sektor publik seperti menjadi pemimpin negara atau pencari nafkah seringkali dianggap sebagai "penyimpangan" atau masuk dalam kategori "darurat".

Budaya patriarki mengakibatkan perempuan berada dalam posisi tawar yang lemah. Sementara itu suara perempuan dalam memperjuangkan kepentingannya tidak tersalurkan melalui mekanisme pengambilan keputusan formal. Marginalisasi, diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak menjadi sebab penting dari parahnya masalah kemiskinan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Karena itu, pengarusutamaan gender dalam penanggulangan kemiskinan menjadi bagian yang tak terelakkan. Penerapan perspektif gender dalam melihat kemiskinan tidak untuk mengecilkan arti kemiskinan yang dialami laki-laki, tetapi untuk menegaskan bahwa kemiskinan yang dialami perempuan bersifat spesifik, sehingga dibutuhkan adanya penanganan yang khusus pula.⁶

Jika dilihat dari perspektif kajian isu gender dalam Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan melimpahnya publikasi yang mengangkat wacana gender dan Islam sebagai suatu "kerangka ideologi" pengarusutamaan gender berperspektif Islam, yang merupakan fakta yang meluas ke dalam suatu *mainstream* "gerakan feminisme

⁶ Ibid, hlm. 164

Islam”. Definisi “feminisme Islam” dikalangan aktifis wanita muslim masih mengalami perdebatan serius, tetapi pada tingkat *common vision* dapat diartikan sebagai suatu hal dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender.⁷

Dalam Islam, pemberdayaan perempuan merupakan upaya pencerdasan muslimah hingga mampu berperan menyempurnakan seluruh kewajiban dari Allah SWT, baik di ranah domestik maupun publik. Pemberdayaan perempuan ini didasarkan pada visi menjadi perempuan unggul sebagai *ummun warobbatul bait* sebagai mitra laki laki demi melahirkan generasi cerdas, takwa, pejuang syariah, dan khafilah, dan kesakinahan keluarga.

Sementara misinya adalah mengokohkan ketahanan keluarga muslim, melahirkan generasi pejuang, membangun muslimah berkarakter, kuat dalam rangka amal, mskruf, nahi, munkar, melahirkan perempuan sebagai mitra laki laki dalam rumah tangga dan pejuang dimasyarakat. Sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya dalam QS.An Nahl ayat 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Ajaran Islam lebih terfokus mengikat manusia untuk selalu mentaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya serta menuntun hidup manusia dalam

⁷ Arief Subhan, dkk. Citra Perempuan dalam Islam, Pandangan Ormas Keagamaan, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003. Hlm. 1.

berbagai aspek kehidupan, baik berkenaan dengan rumah tangga maupun lingkungan masyarakat. Dalam suatu rumah tangga, suami istri harus dapat menciptakan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan untuk semua anggota keluarga. Dengan terciptanya kenyamanan dalam keluarga dipastikan setiap anggota keluarga dapat mengabdikan atau menyumbangkan darma baktinya untuk masyarakat. Wanita sangat memegang peranan penting dalam kehidupan rumah tangga dan Islam memberikan kebebasan kepada kaum wanita untuk berpartisipasi di masyarakat. Islam mengangkat derajat kemuliaan wanita dalam setiap perkembangan zaman.⁸

Secara umum yang berperan sebagai penopang kehidupan keluarga adalah suami, hal ini merupakan wujud bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan sebagai firman Allah SWT dalam, QS. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلْتَصَلْتُمْ فَانْتَبِطْ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ طِئًّا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari

⁸ Hadijah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994). hlm. 8

jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Pendekatan keagamaan dalam pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi menjadi salah satu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sangat strategis, baik dari sisi internal yaitu perempuan itu sendiri, maupun dari sisi eksternal yaitu akses, kesempatan, dan lingkungan yang mempengaruhi.

Berangkat dari keyakinan bahwa pada dasarnya Islam menganut paham keadilan, maka segenap ketidakadilan yang berkembang dalam masyarakat Islam pada dasarnya adalah konstruksi sosial. dan tafsiran yang seringkali muncul sebagai jawaban terhadap problem sosial (*asbabun-nuzul*) dari suatu ayat pada saat itu. Oleh karena itu yang diperlukan adalah prinsip dasar hubungan itu yakni keadilan, dan segenap yang melanggar dari prinsip tersebut harus didekonstruksi.

Jika dilihat dari capaian IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota terlihat kesenjangan yang cukup tinggi antar Kabupaten/Kota. Akan tetapi ada hal yang menarik di Kabupaten Pringsewu, secara kumulatif angka IDG Kabupaten Pringsewu sudah di atas capaian angka IDG Provinsi Lampung tetapi untuk indikator Sumbangan Pendapatan Perempuan berada di posisi paling rendah diantara Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Berdasarkan pra survei yang dilakukan ke Kabupaten Pringsewu dengan wawancara terhadap Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk (P3AP2KB), Kepala Kantor Kementerian Agama, dan Ketua Muslimat NU Kabupaten Pringsewu

diketahui bahwa upaya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, meskipun hasil yang dicapai belum optimal.

Muslimat Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Pringsewu sebagai organisasi kemasyarakatan yang merupakan salah satu Badan Otonom dari Nahdatul Ulama yang berdiri sejak tanggal 29 Maret 1946 merupakan organisasi yang salah satu program prioritasnya adalah pemberdayaan ekonomi perempuan. Partisipasi Muslimat NU dalam pemberdayaan ekonomi perempuan diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengoptimalkan upaya peningkatan kapasitas dan kemandirian perempuan melalui pendekatan keagamaan.

Berangkat dari uraian di atas dan berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat secara umum serta masyarakat di Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu secara khusus, disertasi ini akan memfokuskan pada upaya Pemberdayaan Perempuan Miskin Pedesaan dalam Perspektif Islam Guna Mewujudkan Lampung Berjaya (Studi pada Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Pringsewu). Dengan memperhatikan konsentrasi penduduk miskin yang sebagian besar berada di pedesaan, komposisi penduduk yang hampir berimbang antara perempuan dan laki-laki serta ketimpangan yang cukup besar dalam kontribusi perempuan di sektor ekonomi, maka pemberdayaan perempuan pedesaan menjadi penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut secara mendalam.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Secara kuantitatif jumlah perempuan hampir mencapai separuh jumlah penduduk di Provinsi Lampung. Dalam jumlah tersebut perempuan merupakan kekuatan yang luar biasa dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan dalam kontribusinya di sektor ekonomi. Sehingga diperlukan komitmen bersama terhadap upaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perempuan yang menghalangi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi, baik dari pihak lain ataupun dari perempuan pelaku ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan suatu analisis yang bisa dijadikan rujukan untuk memperbaiki kondisi tersebut.
2. Ketimpangan akses ekonomi antara perempuan dan laki-laki, banyak disebabkan karena pembagian peran gender dalam rumah tangga yang lebih banyak merugikan perempuan. Sehingga konsep kemiskinan perempuan baik sebagai individu maupun sebagai kepala rumah tangga menjadi hal yang sangat strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
3. Konsentrasi penduduk miskin yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan dimana budaya patriaki masih sangat kental, memerlukan strategi

dan pendekatan baru untuk meningkatkan perempuan miskin perdesaan dalam akses dan kontrol terhadap sumber-sumber ekonomi.

C. BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka perlu pembatasan masalah. Dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengembangan masyarakat Islam dalam penelitian ini merujuk kepada pendapat Ibnu Khaldun mengatakan bahwa secara etimologi pengembangan berarti membina dan meningkatkan kualitas. Masyarakat Islam berarti kumpulan manusia yang beragama Islam, yang meneliti hubungan dan keterkaitan ideologis yang satu dengan yang lainnya. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia itu secara individu diberikan kelebihan, namun secara kodrati manusia memiliki kekurangan. Sehingga kelebihan itu perlu dibina agar dapat mengembangkan potensi pribadi untuk dapat membangun.
- b. Gender dalam penelitian ini diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Gender bukan merupakan kodrat/takdir Tuhan tetapi berkaitan dengan keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya ditempat mereka berada. Sehingga gender merupakan suatu konsep budaya pada suatu masyarakat tertentu yang berupaya membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku,

mentalitas dan karakteristik emosional yang berkembang dalam masyarakat tersebut.

- c. Gender dari Perspektif Islam dalam penelitian ini adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang digambarkan oleh ayat-ayat Al-Quran, suami dan istri sebagai hubungan yang saling menyempurnakan yang tidak dapat terpenuhi kecuali atas dasar kemitraan. Hal ini diungkapkan Al-Quran dengan istilah *ba'dhukum mim ba'dhi* – sebagian kamu (laki-laki) adalah sebahagian dari yang lain (perempuan). Istilah ini atau semacamnya dikemukakan kitab suci Al-Quran baik dalam konteks uraiannya tentang asal kejadian laki-laki dan perempuan, dapat dilihat pada QS. Ali Imran: 195, maupun dalam konteks hubungan suami istri, dapat dilihat pada QS. An-Nisa': 21 serta kegiatan-kegiatan sosial, yang juga dapat dilihat pada QS. At-Taubah: 71. Pada dasarnya semangat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil (equal). Oleh karena itu subordinasi terhadap kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat keadilan yang diajarkan Islam. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba.
- d. Kesetaraan Gender dalam penelitian ini meliputi kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti : politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan

ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki menjadi tanda terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Menurut Naila Kabeer ketimpangan gender merupakan hasil dari relasi sosial yang dapat berubah melalui faktor-faktor seperti perubahan makro atau agen manusia.

- e. Pemberdayaan Perempuan dalam penelitian ini adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Dalam proses tersebut harus melibatkan empat aktor secara aktif yaitu keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Dan dalam proses pemberdayaan tersebut akan meliputi (1) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku; (2) tahap transformasi kemampuan; (3) tahap peningkatan kemampuan, dan (4) tahap kemandirian.
- f. Masyarakat Miskin Perdesaan dalam penelitian mengacu pada pengertian masyarakat miskin menurut Badan Pusat Statistik yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari

sisi pengeluaran. Sehingga yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. ini adalah. Sedangkan menurut catatan Bank Dunia, tiga perempat dari kaum miskin di dunia adalah petani di pedesaan. Statistik ini mencerminkan tiga dari lima orang Indonesia, yang tinggal di daerah pedesaan dimana pertanian merupakan pekerjaan utama. Banyak dari petani subsistem ini adalah perempuan yang juga bertanggung jawab untuk tugas-tugas rumah tangga dan dapat dicabut dari pengambilan keputusan dan upah yang sama.

- g. Rakyat Lampung Berjaya dalam penelitian ini merupakan Visi Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang memenuhi kondisi kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya, maju dan berdaya saing, serta sejahtera.

D. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang dan identifikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pemberdayaan perempuan miskin pedesaan di Provinsi Lampung, yaitu:

1. Bagaimana kesetaraan kesempatan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan miskin pedesaan terhadap hasil pembangunan dan sumber daya yang ada?

2. Bagaimana perspektif Islam terhadap kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan khususnya di sisi ekonomi?
3. Bagaimana komunikasi perubahan cara pandang dengan pendekatan keagamaan dapat mendukung pemberdayaan perempuan miskin perdesaan baik dari sisi internal perempuan itu sendiri maupun sisi eksternal di luar dirinya secara pribadi?
4. Bagaimana strategi pemberdayaan perempuan miskin perdesaan dengan pendekatan perspektif Islam untuk mewujudkan Lampung Berjaya?

E. TUJUAN & KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pemberdayaan perempuan miskin perdesaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan perspektif Islam terhadap pemberdayaan perempuan. Secara spesifik tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa lebih mendalam tentang kondisi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kontribusinya di sektor ekonomi, serta permasalahan yang dihadapi perempuan yang menghalangi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi, baik dari pihak lain ataupun dari perempuan pelaku ekonomi itu sendiri.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisa lebih mendalam perspektif Islam dalam pemberdayaan perempuan. Ketimpangan akses ekonomi antara perempuan dan laki-laki, banyak disebabkan karena pembagian peran gender dalam rumah tangga yang lebih banyak merugikan perempuan. Sehingga pendekatan keagamaan terhadap konsep kemiskinan perempuan baik sebagai individu maupun sebagai kepala rumah tangga menjadi hal yang sangat strategis dalam upaya pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa lebih mendalam budaya patriaki di wilayah pedesaan dan posisi perempuan di pedesaan dari sisi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap hasil pembangunan dan sumber-sumber ekonomi.
- d. Untuk menganalisa, mengembangkan dan merumuskan Strategi Pemberdayaan Perempuan Miskin Pedesaan dalam perspektif Islam Guna Mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.

2. Kegunaan

Filsafat ilmu mendalilkan bahwa ilmu pengetahuan haruslah memiliki 3 (tiga) komponen dasar yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Aspek aksiologi ditunjukkan dengan kegunaan/manfaat yang diberikan kepada masyarakat luas. Karenanya penelitian ini dimaksudkan turut memberikan kontribusi, baik untuk pengembangan keilmuan maupun aplikasi kebijakan.

a. Kontribusi Keilmuan (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan bagi akademisi dari teori yang ada terutama ilmu pengembangan masyarakat Islam dan diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan pemikiran untuk penelitian dan kajian yang lebih mendalam di tentang pengembangan masyarakat Islam, analisis gender dalam perspektif Islam, serta pemberdayaan ekonomi perempuan.

b. Kontribusi Kebijakan (Praktis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pemerintah dan masyarakat serta bahan perbandingan dalam pengambilan kebijakan melalui perspektif Islam dalam upaya pemberdayaan perempuan miskin pedesaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN PUSTAKA

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada, sudah ada penelitian terkait dengan judul yang penulis kaji. Jadi kedudukan penelitian yang akan peneliti lakukan merupakan pengembangan dari hasil riset sebelumnya. Untuk menghindari adanya temuan-temuan yang sama, penulis memberikan beberapa contoh penelitian yang berkaitan dengan proposal penelitian penulis. Adapun beberapa karya ilmiah yang dapat penulis pakai sebagai landasan teoritis dan rujukan untuk mendukung dalam penulisan proposal disertasi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Disertasi **Agama dan Gerakan Sosial Ekonomi Muslim Perdesaan** (Penelitian terhadap Jemaah Majelis Taklim dan Baitul Mal wat Tanwil di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung) oleh Firman Nugraha, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 1439 H/2018 M.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa agama pada muslim perdesaan tidak secara langsung membentuk perilaku ekonomi dan mendorong terwujudnya tindakan kolektif berupa gerakan sosial ekonomi. Gerakan sosial ekonomi keagamaan terbentuk ketika

simbol agama bertemu dengan faktor kesempatan, antara lain : *pertama*, dukungan struktural yaitu menguatnya semangat formalisasi doktrin Islam, bukan hanya dalam konteks ritual melainkan juga dalam upaya ekonomi Islam. Dengan demikian gerakan ini dapat dikatakan merupakan bagian dari mata rantai “kebangkitan Islam” melalui implementasi ekonomi Islam. *Kedua*, adanya ketegangan struktural akibat terbentuknya kemiskinan baru sebagai dampak perubahan ekologi. *Ketiga*, formalisasi substansi agama menjadi simbol sekaligus *framing* gerakan. *Keempat*, watak kegotongroyongan di perdesaan dan perilaku kolektif alamiah dalam majelis taklim telah menjadi modal dasar untuk menjadi kelompok terorganisir dalam gerakan ekonomi. *Kelima*, adanya aktor gerakan yang hadir dari fregmentasi kewibawaan desa baru akibat modernisasi perdesaan *Keenam*, gerakan ini bekerja dengan prinsip-prinsip koperasi, sebagai pola yang telah lama akrab dengan kehidupan masyarakat selain kesempatan regulasi.

Artinya, penelitian ini berbeda dengan pendapat Max Waber dan Geerts yang menyatakan perilaku ekonomi lebih diperlihatkan oleh pemeluk agama yang modernis. Jika Weber dan Geertz menekankan pemahaman keagamaan yang modern dalam pembentukan perilaku ekonomi ketika bertemu dengan rasionalitas, maka berdasarkan penelitian ini, muslim perdesaan yang tradisionalis, dorongan perilaku ekonomi kolektifnya terbentuk ketika bertemu dengan enam faktor kesempatan sebagaimana tersebut di atas.

Penelitian ini juga berbeda dengan pandangan Joachim Wach yang menyatakan ada keadaan yang paralel antara dimensi pemikiran, ritual dan kehidupan sosial pemeluk agama. Sederhananya, jika dipandang dengan teori Wach ini, kehidupan muslim perdesaan di Arjasari yang tradisional merupakan cerminan dari pemikiran keagamaan yang tradisional juga. Hasil pemikiran yang tradisional ini relatif akan lebih menerima terhadap pelbagai keadaan, termasuk dalam ekonomi sebagai sebuah takdir. Namun demikian, dalam konteks modernisasi perdesaan yang terus berubah, dimensi pemikiran muslim perdesaan ikut terbentuk dengan perubahan-perubahan tersebut. Dan ini berarti bahwa watak implementasi doktrin itu senantiasa selalu berdialog dengan konteks sosialnya.

2. Disertasi **Peran Wanita Karier Dalam Perspektif Hukum Islam** (Studi kasus di Pekanbaru) oleh Herlina, Program Pasca Sarjana (Pps) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau 1441 H/2020 M.

Penelitian ini menemukan kuantitas dan kualitas dalam berkarya, mengemban amanah antara pekerjaan dan rumah tangga harus berjalan dengan dengan baik dan harmonis. Wanita memilih berkarier harus seizin suami (jika telah berumah tangga) atau izin orangtua/saudara laki-laki dewasa (jika belum berumah tangga). Wanita yang berkarier harus berpegang teguh pada hukum wajib, sunah, makruh, dan harum. Pengejaran prestasi dalam berkarier harus seimbang dengan tingkat pencapaian keharmonisan keluarga. Wanita karier dengan jenis pekerjaan wiraswasta berpengaruh sangat positif dan signifikan

terhadap golongan umur, jenis pendidikan, kuantitas waktu bekerja dan jumlah penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas wirausaha dapat menghasilkan jumlah penghasilan yang lebih banyak dengan lebih dapat mengelola waktu yang baik dan fleksibel. Perlu adanya regulasi berupa Undang-undang untuk mengatur pola wanita dalam memainkan peran sebagai wanita karier yang harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan agama, terutama pada Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Perkawinan Bab XII.

3. Jurnal Asketik Vol. 1 No. 2 Desember 2017, yang berjudul **Islam dan Praktik Pemberdayaan Perempuan: Studi Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Perempuan oleh Yayasan Sahabat Ibu DI Yogyakarta** oleh Ahmad Arif Widiyanto, Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Malang.

Menurut hasil penelitiannya bahwa penerapan nilai-nilai Islam oleh YSI mampu mendorong lancarnya proses pemberdayaan perempuan. Nilai-nilai Islam tidak hanya menjadi inspirasi dan instrumen pemberdayaan, namun juga ditransfer pada komunitas melalui program PINTAR. Ajaran-ajaran Islam seperti fikih dan parenting disampaikan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam mendidik anak. Di sisi lain, praktik-praktik Islami seperti ikrar, akad, dan infaq membentuk pemahaman bahwa memberdayakan perempuan adalah kewajiban terhadap Tuhan dan sesama. Hal tersebut dapat memperkuat komitmen para partisipan perempuan untuk mengikuti program-program pemberdayaan. Namun, ada juga beberapa partisipan yang

memandang praktik tersebut terlalu memberatkan karena kesibukan. Pelajaran yang didapat dari penelitian ini adalah pentingnya revitalisasi nilai-nilai religius dan kearifan lokal dalam program-program pemberdayaan agar dapat lebih kontekstual dan diterima masyarakat.

4. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 19, No.2, Oktober 2014: 154-167, Model **Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten**, oleh Agung Utama, Titin Hera Widi Handayani Universitas Negeri Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan miskin di Kecamatan Wedi memiliki potensi yang tinggi dalam menjalani profesi kewirausahaan atau memiliki potensi tinggi sebagai calon *entrepreneur* atau wirausaha. Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan miskin di Kecamatan Wedi dalam rangka pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan dengan menggunakan model *Project Based Learning* dinilai efektif dikarenakan sebagian besar peserta sukses ditinjau dari tingkat penguasaan kepribadian (jiwa) kewirausahaan dan keterampilan yang dimiliki selama memperoleh pengalaman belajar bisnis riil dengan model *Project Based Learning*.

Agar usaha kewirausahaan yang dirintis oleh peserta pelatihan kewirausahaan semakin sukses dan berkembang di masa yang akan datang, perlu kiranya dilakukan pendampingan secara berkala dan berkelanjutan dengan harapan nilai-nilai jiwa kewirausahaan serta keterampilan berusahanya semakin kuat

dalam diri peserta pelatihan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa penguasaan keterampilan berwirausaha yang paling lemah adalah kemampuan membangun jaringan dan masalah pemasaran. Oleh karena itu, disarankan agar tahap awal dilakukan pendampingan oleh pihak-pihak terkait dalam membantu kelangsungan dan keberlanjutan usaha yang telah ada.

5. Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 9, Nomor 1, Juni 2015, **Kemiskinan, Perempuan Dan Agama**, oleh Taufik, Pascasarjana UIN Yogyakarta.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kemiskinan, perempuan dan agama merupakan problematika kehidupan kontemporer yang selalu menjadi perbincangan di kalangan ilmuwan-ilmuwan baik psikolog, sosiolog, budayawan, antropolog dan sebagainya. Tiga unsur ini cukup mendominasi dalam mengarungi kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Hubungan dialektis antara ketiganya telah melahirkan hubungan yang memilukan. Kalau kita menghubungkan antara kemiskinan dan agama, maka yang menjadi obyek adalah perempuan. Dan, di antara kemiskinan dan perempuan sangat jelas bahwa korban yang paling menderita adalah perempuan. Sementara pertemuan antara perempuan dan agama selalu menimbulkan kegetiran karena agama memandang perempuan sebagai makhluk setengah laki-laki. Faktor yang ikut menyumbang terjadinya kemiskinan adalah kurang tegaknya keadilan. Sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan membangun masyarakat yang berbasis

keadilan. Dalam konteks ini, agama memiliki peran penting, karena agama, mengandung ajaran tentang keadilan.

6. SEPA : Vol. 9 No.1 September 2012 : 134 – 144, **Model Pemberdayaan Perempuan Miskin melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar**, oleh Sri Marwanti, Ismi Dwi Astuti, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menuliskan bahwa perempuan miskin di daerah perdesaan perlu diberdayakan melalui pengembangan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif. Model yang diusulkan adalah *pro-poor capacity improvement model* (PCIM).

Komponen utama pemberdayaan perempuan miskin adalah: (1) adanya dukungan seluruh stakeholders (baik pemerintah, swasta, LSM maupun Perguruan Tinggi) untuk melakukan program-program penanggulangan kemiskinan yang responsif gender; (2) Adanya *Achievement Motivation Training* untuk menumbuhkan kesadaran (keberdayaan) akan pentingnya mengembangkan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif; (3) Pemantapan jejaring antar sesama perempuan miskin pelaku usaha serta pengusaha lokal sebagai media *learning by doing* ; (4) Pembentukan kelompok-kelompok usaha bersama atas dasar kesamaan jenis usaha; (5) Pengembangan kreativitas melalui *capacity building* agar produk yang dihasilkan menarik bagi pembeli dan sesuai selera pasar dan

memperhitungkan potensi pasar ; (7) Perluasan Sistem Bapak Angkat dengan melibatkan sebanyak mungkin usahawan lokal sehingga dapat memperkuat modal usaha dan pasar bagi perempuan miskin pelaku usaha. Rekomendasi Model yang telah dirumuskan perlu diujicobakan dan diteliti kembali efektivitasnya sehingga dapat dikembangkan model yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perempuan miskin di tingkat akar rumput.

7. Jurnal Sosial dan Humaniora WACANA Vol. 12 No. 2 April 2009, **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa** (*Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Krupuk Ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo*), oleh Arsiyah, (Mahasiswa Program Magister IAP, PPSUB/Staf Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur) dan Heru Ribawanto serta Sumartono (Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FIA UB).

Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa bentuk/macam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa khususnya pengusaha krupuk ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, meliputi: pemberian bantuan modal, bantuan perorangan, pelatihan, studi banding, bantuan bahan baku/peralatan dan perluasan pasar.

Sedangkan saran yang disampaikan oleh penulis adalah perlu dilakukan upaya pembinaan yang lebih intensif untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pengusaha krupuk ikan dengan memperhatikan kondisi

sosial ekonomi masyarakat, baik melalui pembinaan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun studi banding ke daerah penghasil ikan. Perlu diberikan kemudahan dalam dukungan modal, atau kemudahan dalam prosedur untuk memperoleh kredit usaha. Disamping itu perlu diberikan bantuan dalam bentuk peralatan dan sekaligus pelatihan penggunaannya.

Perlu diberikan kemudahan fasilitas bagi pengusaha krupuk ikan untuk memperoleh hak paten, dalam hal ini akan mempermudah pengusaha krupuk ikan untuk mengajukan bantuan modal (kredit) kepada Bank. Perlu dilakukan upaya pembenihan ikan di lokasi desa Kedungrejo itu sendiri agar dapat melancarkan arus produksi.

8. Jurnal I-FINANCE Vol.05 No.01 Juli 2019, **Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Perspektif Gender dan Ekonomi Islam: Studi Kasus Akses Pengusaha UMK Perempuan terhadap Lembaga Keuangan Syariah BMT di Palembang**, oleh Maftukhatusolikhah dan Dwi Budiarto, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Melalui produk-produk pembiayaan yang membuka akses yang luas bagi pengusaha UMK perempuan, khususnya Produk Pembiayaan Tanggung Renteng dapat dikatakan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang sensitif gender' dan bisa semakin mendorong terwujudnya gender equalities, karena secara demikian BMT telah menganggap penting potensi, partisipasi, dan akses pengusaha UMK Perempuan terhadap sumber-sumber keuangan.

Keberadaan BMT dan Produk-produknya yang accessible bagi perempuan, secara khusus dapat dikatakan mampu meningkatkan peranan perempuan dalam bidang ekonomi. Dengan membantu peningkatan ekonomi keluarga melalui berbagai jalur –dalam hal ini kewirausahaan–, maka diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan memacu pertumbuhan industri (*home industry*), dan pada gilirannya akan mendorong peningkatan pemenuhan kebutuhan dan kualitas hidup. Di samping itu kaum Perempuan nasabah BMT tersebut bisa lebih memaksimalkan *Al-quwwah al-aqliyyah* yang mereka miliki, atau keunggulan potensi intelektual yang antara lain berfungsi melatih keahlian untuk menghasilkan sarana-sarana pendukung kehidupan (peradaban) dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan dan mencapai masalah khususnya dalam bidang ekonomi. Dengan kata lain, program BMT telah mendukung pandangan Islam, karena perempuan juga dapat berkiprah dalam bidang ekonomi, melalui cara bekerjasama dengan elemen masyarakat lainnya dalam membangun peradaban yang luhur. Dalam dalam hal ini perempuan dan laki-laki, dapat bekerjasama memaksimalkan potensi dan peranannya dalam kehidupan, baik dalam peran produktif, peran reproduktif, ataupun peran sosial. Dalam kerangka pencapaian *masalah* yang dimensinya menyeluruh atau *al-maslahah al kuliyyah* dunia dan akhirat yang antara lain terlihat dari implikasinya terhadap terciptanya peradaban yang luhur sesuai dengan tuntutan Islam, sebagai lembaga keuangan syariah yang memberikan akses yang luas bagi masyarakat golongan menengah ke

bawah, BMT telah membangun konteks, sarana dan prasarana untuk mewujudkan *al-maslahah al kuliyyah* menjadi rasional.

B. KERANGKA PIKIR

1) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu problem pelik yang dihadapi umat manusia. Sebuah hasil survey yang dipublikasikan oleh Sam Mountford (Direktur Riset GlobeScan) melalui BBC pada 17 Januari 2012 menempatkan kemiskinan sebagai masalah paling serius yang dihadapi masyarakat dunia dibanding masalah perubahan iklim, terorisme, dan perang. Penelitian ini dilakukan terhadap 25 ribu orang lebih dari 23 negara.⁹

Kemiskinan adalah persoalan kemanusiaan, sehingga membawa konsekuensi adanya tanggung jawab moral bagi setiap orang untuk memperhatikan kehidupan orang yang hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan juga merupakan pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia. “...*human rights become a constitutive element of development and human rights violations become both a cause and symptom of poverty*”. Chambers sebagaimana dikutip oleh Soetrisno mengemukakan bahwa inti dari masalah kemiskinan terletak pada *deprivation trap* atau jebakan kekurangan. *Deprivation trap* terdiri dari lima ketidakberuntungan yang melilit kehidupan keluarga miskin, yaitu (1) kemiskinan

⁹ <http://www.waspada.co.id/kemiskinan-jadi-masalah-terbesar-dunia>

itu sendiri; (2) kelemahan fisik; (3) keterasingan; (4) kerentanan, dan (5) ketidakberdayaan¹⁰.

Beberapa ahli mempunyai pemahaman yang berbeda-beda dalam mendefinisikan kemiskinan. Berikut definisi kemiskinan menurut beberapa ahli:

- a. Benyamin White mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah perbedaan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat dari satu wilayah dengan wilayah lainya¹¹
- b. Parsudi Suparlan mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹²
- c. Dalam konteks politik, John Friedman mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuatan sosial.
- d. Emil Salim mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin. Kelima karakteristik penduduk miskin tersebut adalah: 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri; 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri; 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah; 4) Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan; 5)

¹⁰ Soetrisno, Loekman, *Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan. Dalam Dewanta (ed), Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Aditya Medi, 1995), hlm. 19

¹¹ Dillon H.S dan Hermanto, *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*, (Jakarta: LP3ES, 1993), hlm. 10.

¹² Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 10

di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.¹³

- e. Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal.

Bentuk-bentuk kemiskinan menjadi beragam ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jika dilihat dari sudut pandang pendapatan, kemiskinan dibagi menjadi dua antara lain:

(1) Kemiskinan Absolut

Seorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila

¹³ Supriatna, Tjahya. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. (Bandung: Humaniora Utama Press, 1997), hlm. 82

hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan

(2) Kemiskinan Relatif

Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.¹⁴

Selanjutnya jika dilihat dari sisi penyebabnya, kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu:

(1) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

(2) Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan juga disebabkan oleh faktor-faktor rekayasa manusia.¹⁵

¹⁴ Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 157.

¹⁵ Ibid

Sementara itu Effendi membedakan konsep kemiskinan dalam tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi, sosial dan politik.

- (1) *Secara ekonomi*, kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Kemiskinan ini dapat diukur secara langsung dengan menapakan persediaan sumber daya yang tersedia pada seseorang atau keluarga dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku.
- (2) *Secara sosial*, kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Dapat juga dikatakan bahwa kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia. Faktor-faktor penghambat dalam dimensi kemiskinan sosial ini dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. Faktor yang datang dari luar kemampuan seseorang, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat mencegah seseorang memanfaatkan kesempatan yang ada. Kemiskinan tipe ini sering disebut sebagai kemiskinan tipe setruktural.
 - b. Faktor yang datang dari dalam diri seseorang, misalnya rendahnya pendidikan atau karena budaya. Kemiskinan tipe ini disebut sebagai tipe kemiskinan kultural

(3) *Secara politik*, kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam menentukan pilihan-pilihannya sendiri yang memiliki kaitan dengan kepemilikan umum, misalnya tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam penentuan suatu program.¹⁶

Dalam rangka mengentas kemiskinan, Indonesia maupun negara-negara berkembang yang lainnya telah menggunakan teori-teori ekonomi yang ada, baik itu mengadopsi dari pemikiran barat maupun dari nasional sendiri sebagai berikut:

1) Teori ekonomi neoliberal

Munculnya neoliberalisme dilatarbelakangi oleh kegagalan kebijakan ekonomi teknokratis dan intervensionis pada tahun 60-an yang melahirkan ketidakpuasan dan konflik kepentingan.¹⁷ Sehingga, sistem ini mensyaratkan dua hal, pertama meminimalisir intervensi negara dan kedua mengakui kebebasan individu. Pada intinya paham ini memperjuangkan persaingan bebas yakni paham yang memperjuangkan hak-hak kepemilikan dan kebebasan individual. Mereka lebih percaya kepada kekuatan pasar untuk menyelesaikan masalah sosial daripada regulasi negara.

Teori ini berhasil menurunkan inflasi dan mendorong perekonomian di beberapa negara. Seperti di Inggris pada pemerintahan Margareth Thatcher yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1979. Begitu juga pada kepemimpinan Ronald Reagan di Amerika Serikat dalam dua periode (1981-1989). Keduanya menerapkan sistem yang sama yakni

¹⁶ Aziz Muslim, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta : Samudra Biru, Cetakan I, November 2012), hlm. 3-4

¹⁷ Ibid., hlm. 50.

privatisasi, deregulasi, serta pengurangan pajak dan subsidi.¹⁸ Kesemuanya ini merupakan ciri dari neoliberalisme.

Kelebihan dari sistem ekonomi neoliberal ini antara lain adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena semua pihak bebas untuk berinvestasi, tidak ada aturan yang mampu membatasi kemampuan investasi. Selain itu daya beli masyarakat ditingkatkan karena adanya stimulus, UMR naik dan kesenjangan sosial diperkecil.

Kelemahannya adalah minimnya kontrol pemerintah sehingga regulasi kurang. Pihak yang lemah akan semakin lemah dan yang kuat akan semakin merajalela. Selain itu, masyarakat menjadi semakin konsumtif dan akhirnya terlilit hutang.

2) Teori Ekonomi Pancasila

Teori ekonomi pancasila adalah teori ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Teori ini bercirikan asas keselarasan dan lebih mengutamakan masyarakat dan bukan kemakmuran orang-seorang.¹⁹ Penggunaan asas kekeluargaan bertujuan untuk meminimalisir persaingan antar masyarakat. Sistem ekonomi yang telah digunakan seperti sistem kapitalis-liberal yang diajarkan oleh Adam Smith, menjadikan masyarakat bersaing secara bebas sehingga menimbulkan dampak kesenjangan sosial dan kemakmuran hanya dinikmati oleh orang-seorang.

Alasan Mubyarto menggunakan asas kekeluargaan adalah karena ia menganalogikan suatu sistem ekonomi sebagai suatu keluarga. Artinya,

¹⁸ Ibid., h. 51-56.

¹⁹ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintas pemikiran Mubyarto*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 40.

kemungkinan terjadinya persaingan antar anggota dalam suatu keluarga sangat kecil. Apabila antar anggota sudah mulai mempunyai semangat persaingan, maka pasti akan timbul keretakan hubungan antara yang satu dengan yang lain.²⁰ Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa persaingan akan tetap terjadi baik persaingan yang diiringi dengan suatu kerjasama maupun persaingan yang murni tanpa diiringi kerjasama.

Kemakmuran secara merata merupakan tujuan diberlakukannya ekonomi pancasila. Para pelaku ekonomi khususnya bagi para penguasa, diharapkan untuk tidak memikirkan kepentingan pribadi. Sistem perekonomian seperti inilah yang kemudian mampu meminimalisir permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

3) Teori Anggaran pro kaum miskin

Anggaran pro kaum miskin adalah penganggaran berdasarkan penilaian kebutuhan dasar masyarakat miskin dengan proses yang melibatkan kelompok miskin untuk ikut menentukan skala prioritasnya.²¹ Dalam pengertian lain, anggaran pro kaum miskin dimaknai sebagai sebuah penganggaran yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat khususnya kelompok masyarakat miskin melalui proses yang adil, partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel.²²

²⁰ Ibid, hlm. 44

²¹ Joe Fernandez, *Anggaran Pro Kaum Miskin: Konsep dan Praktik*, dalam *Anggaran Pro Kaum Miskin: Sebuah Upaya Menyejahterakan Kaum Miskin*, ed. Abdul Waidl dkk, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 15.

²² Ibid., hlm. 20

Teori ini menawarkan solusi penanggulangan kemiskinan dengan bertolak pada akar masalah kemiskinan itu sendiri. Definisi di atas menghasilkan sebuah pandangan yang melihat anggaran negara sebagai instrumen pemberdayaan. Sedangkan proses penganggaran itu sendiri dipandang sebagai proses politik di mana partisipasi kaum miskin mutlak diperlukan, sekalipun demokrasi perwakilan telah berjalan.²³

Untuk dapat memahami anggaran pro kaum miskin ini, tidak hanya soal logika anggaran dan penganggaran, tetapi juga memahami kemiskinan yang memiliki dimensi jauh lebih luas dari pada sekedar pendapatan yang rendah.

Sentralitas peran anggaran dalam kehidupan publik menjadikan penentuan prioritas anggaran sudah semestinya melewati uji publik. Keterlibatan publik akan memberikan pertimbangan rasional untuk menghasilkan program program dan prioritas anggaran yang efisien, tepat sasaran, tepat waktu dan tentu saja legitimasi hukum yang lebih kuat.²⁴

Dari sekian teori yang ada khususnya teori-teori yang sudah diterapkan, ternyata belum mampu memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Kemiskinan tetap menjadi permasalahan yang meliputi beberapa negara khususnya di Indonesia. Ketidakberhasilan tersebut bisa saja karena kesalahpahaman dalam pelaksanaan teori. Selain itu, bisa saja karena pada dasarnya sistem itu hanya mampu memperbaiki perekonomian masyarakat yang

²³ Ibid., hlm. 26

²⁴ Ibid., hlm. 20

mempunyai kekuatan untuk meningkatkan perekonomiannya, sedangkan masyarakat yang jauh tertinggal dan tidak mampu mengikuti perjalanan sistem akan semakin tertinggal. Sehingga permasalahan baru yang muncul adalah kesenjangan sosial yang meningkat begitu tajam.

Al-Qur'an menggunakan beberapa kata untuk menggambarkan kemiskinan, antara lain dengan kata *faqir*, *miskin*, *al-sail* dan *al-mahrum*. tetapi, kata *faqir* dan *miskin* lebih sering dijumpai di dalam al-Qur'an, di dalam al-Qur'an kata *faqir* dijumpai 12 kali dan kata *miskin* dijumpai 25 kali, yang masing-masing digunakan dalam pengertian yang berbeda-beda.²⁵ Namun, al-Qur'an sendiri tidak memberikan definisi yang rinci untuk istilah-istilah tersebut.

Beberapa kosa kata di dalam al- Qur'an yang biasanya dimaknai dengan miskin mengindikasikan bahwa miskin adalah suatu kondisi dimana seseorang tersebut membutuhkan pertolongan. Dari pernyataan tersebut, miskin dapat dimaknai sebagai kondisi seseorang yang sedang membutuhkan bantuan dari orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan akan makan dan minum.

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari Tuhan, namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan. Al-Qur'an telah menyinggung dalam surat Az-Zukhruf: 32

²⁵ Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 31

ج الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي مَعِيشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا نَحْنُ رَبِّكَ رَحْمَتَ يَفْسِمُونَ أَهْمُ

ط سَخِرِيًّا بَعْضًا بَعْضُهُمْ لِيَتَّخِذَ دَرَجَاتٍ بَعْضٌ فَوْقَ بَعْضِهِمْ وَرَفَعْنَا

يَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرُ رَبِّكَ وَرَحْمَتُ

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus “peringat” bagi kelompok manusia yang lebih “berdaya” untuk salingmembantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7.

أَلْقُرْبَىٰ وَوَالِدِيٍّ وَاللرَّسُولِ فَلِللرَّسُولِ أَهْلِ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ أَفَاءَ مَا

ج مِنْكُمْ أَلَا غَنِيَاءَ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَى السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَىٰ

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا ۚ فَاننَّهُوَا عَنْهُ نَهَلِكُمْ وَمَا فَخُدُوهُ الرَّرَسُولُ ءَاتِكُمْ وَمَا

الْعِقَابِ شَدِيدُ

Artinya : Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk Kota-Kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anakyatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara

kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak diakibatkan sikap dan perilaku umat yang salah dalam memahami ayat-ayat Allah SWT, khususnya pemahaman terhadap kepemilikan harta kekayaan. Dengan demikian, apa yang kemudian disebut dalam teori sosiologi sebagai “Kemiskinan absolut” sebenarnya tidak perlu terjadi apabila umat Islam memahami secara benar dan menyeluruh (*kaffah*) ayat-ayat Tuhan tadi.

Kemiskinan dalam Islam lebih banyak dilihat dari kacamata non-ekonomi seperti kemalasan, lemahnya daya juang, dan minimnya semangat kemandirian. Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi/peningkatan pendapatan. Konsep pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititik beratkan pada “menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada “penghapusan kemiskinan” semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sementara. Demikian pula, di dalam mengatasi *problematika* tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan memanfaatkan sumber- sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji.

Kesadaran tersebut akan menjadi sebuah tindakan nyata apabila individu tersebut sadar dan mau berubah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar Ra'd ayat 11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

2) *Pemberdayaan Masyarakat*

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep yang relatif baru, dimana masyarakat tidak lagi hanya dijadikan obyek dalam pembangunan tetapi juga dijadikan subyek dari pembangunannya sendiri (Kartasasmita, 1996: 151).²⁶ Di sini pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan pembangunan alternatif atau pembangunan sosial yang bertujuan menyelenggarakan pembangunan yang lebih berkeadilan.²⁷

Suparjan & Suyatno menyatakan bahwa model pembangunan alternatif pada hakekatnya memandang bahwa terjadinya kemiskinan dan keterbelakangan bukan

²⁶ Kartasasmita Ginanjar, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (PT. Pustaka Cidesindo ; Jakarta, 1996), hlm. 151

²⁷ Wrihatnolo & Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 67

disebabkan masyarakat bodoh dan tidak memiliki kemampuan, akan tetapi ketidakberdayaan terjadi akibat ketidakmampuan masyarakat terhadap tekanan struktural yang disebabkan oleh model pembangunan pertumbuhan yang mengabaikan hak-hak kemanusiaan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa meskipun berkembang pemikiran kearah pembangunan yang berkeadilan tetapi pertumbuhan tetap diperlukan. Untuk itu diperlukan upaya untuk memadukan konsep pertumbuhan dan pemerataan yang melahirkan model yang disebut pemerataan dengan pertumbuhan yang dikembangkan berdasarkan studi yang disponsori Bank Dunia (Chenery, 1974). Ide dasarnya, pemerintah harus mempengaruhi pola pembangunan sedemikian rupa sehingga produsen yang berpendapatan rendah (yang dibanyak Negara berlokasi di perdesaan dan produsen kecil di perkotaan) akan berpeluang untuk meningkatkan pendapatan dan secara simultan menerima sumber ekonomi yang diperlukan.²⁸

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) mulai berkembang sekitar dekade 1970-an dan semakin populer memasuki awal abad ke-21. Konsep ini dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran yang banyak dikenal dengan aliran *post modernisme* yang titik berat sikap dan pendapatnya adalah antisistem, antistruktur dan antideterminisme kepada dunia kekuasaan.²⁹

Penggunaan istilah pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan paradigma pembangunan masyarakat (*community development*) yang muncul dari kritik terhadap paradigma pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi, yang

²⁸ Suparjan & Hempri Suyatno, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2003), hlm. 4

²⁹ Prijono, O.S., Pranarka, A.M.W, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (CSIS. Jakarta, 1996), hlm. 44

dikemukakan oleh Jim Ife, sebagai berikut *Empowerment means providing people with the resource, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community. Empowerment should be aim of all community development.*³⁰

Pendapat tersebut mengemukakan bahwa pemberdayaan memiliki arti mendekati masyarakat pada sumber-sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menentukan masa depan mereka dan untuk berperan serta di dalamnya, juga memberikan pengaruh pada kehidupan di komunitasnya. Oleh sebab itu pemberdayaan merupakan alat dari seluruh pembangunan masyarakat.

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
- (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;

³⁰ Ife, Jim, *Community Development: Creating Community Alternatives : Vision, Analysis, and Practice*, (Australia, Longman, 1995), hlm. 5

- (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.³¹

Dimensi pemberdayaan masyarakat menurut Effendy (2002: 314-315) mengandung makna tiga pengertian yaitu *enabling*, *empowering*, dan *maintaining* sebagai berikut:³²

1. *Enabling*, diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang berkesinambungan.
2. *Empowering*, mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi. Pendekatan yang ditempuh adalah dengan cara meningkatkan skill dan kemampuan manajerial.
3. *Maintaining*, merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat protektif, potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat.

Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Tahap-tahap dalam pemberdayaan yaitu:³³

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

³¹ Ibid, hlm. 58

³² Effendy, Onong Uhcjana. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 314-315

³³ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm.83

- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-ketrampilan agar terbukawawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).³⁴ Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.³⁵

Menurut Agus Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke

³⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 1995), Cet. Ke-2, hlm.75

³⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: Ptevika Aditam, 2005) Cet Ke-1, hlm. 60

arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperkuat horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.³⁶

Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya bertujuan: membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menemukan tindakan yang akan ia lakukan yang berkaitan dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.³⁷

Terdapat empat prinsip pemberdayaan yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu :³⁸

(1) Kesetaraan

Merupakan prinsip utama dari proses pemberdayaan. Kesetaraan disini adalah adanya kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara laki-laki dan perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing mengakui kelebihan dan

³⁶ Ibid, hlm. 60

³⁷ Agus Ahmad Syafi'i, *Manajemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2001), hlm. 39

³⁸ Sri Najati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands International – 1P, 2005), hlm. 54-60

kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

(2) Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan di evaluasi oleh masyarakat. Makna partisipasi dalam pembangunan atau pemberdayaan menurut Asngari adalah individu atau masyarakat secara aktif terlibat dalam:³⁹

- a) Keterlibatan dalam pengambilan keputusan
- b) Keterlibatan dalam pengawasan
- c) Keterlibatan dimana masyarakat mendapatkan manfaat dan penghargaan.
- d) Partisipasi sebagai proses pemberdayaan
- e) Partisipasi bermakna kerja kemitraan.

(3) Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip kemandirian adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan.

³⁹ Anityas Dian Susanti, *Pola Partisipasi Warga dalam Pengembangan Desa Wisata Umbul Sidomukti Kabupaten Semarang*, (Universitas Diponegoro: ISSN: 0853-2877, Vol.15 No.1 Januari-Juni 2015), hlm. 48

(4) Keberlanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang.

Pemberdayaan merupakan aspek mualamalah yang sangat penting karena terkait dengan pembinaan dan perubahan masyarakat. Di dalam Al Qur'an dijelaskan betapa pentingnya sebuah perubahan, perubahan itu dapat dilakukan dengan salah satu cara di antaranya pemberdayaan yang dilakukan oleh agen pemberdayaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.

Dari ayat diatas sangatlah jelas Allah menyatakan, bahwa allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya sendiri. Dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa manusia diminta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan perubahan dalam kehidupannya. Salah satu upaya

perubahan itu dapat dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.⁴⁰

3) Gender, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan

Konsep mengenai pemberdayaan perempuan (*women's empowerment*), mulai muncul dalam diskursus para feminis di dunia ketiga sejak tahun 1980-an, seiring dengan kritik mereka terhadap konsep-konsep modernisasi dan pembangunan. Dimulai dari Ester Boserup yang mengkritisi pendekatan kesejahteraan sebelum tahun 1970-an. Dalam bukunya *Woman's Role in Economic Development* (1970) Boserup menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan modernisasi di pedesaan di negara-negara dunia ketiga (Asia, Afrika, Latin Amerika) tidak serta merta memberikan keuntungan dan manfaat yang sama terhadap perempuan dan laki-laki, dimana perempuan banyak ditinggalkan dalam proses produksi digantikan dengan mesin, menerima upah yang sangat rendah di sektor non-pertanian di daerah perkotaan, dan bahkan tidak dihargai pekerjaan mereka di pedesaan.⁴¹

Kemudian, kritik para feminis terhadap pembangunan ekonomi semacam itu diterjemahkan dalam upaya mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan melalui pendekatan *Women in Development* (WID) sejak tahun 1970an. Pengadopsian WID ditandai pada Konferensi Tingkat Tinggi PBB pertama tentang Perempuan di Mexico tahun 1975, yang memperkenalkan term *Women in*

⁴⁰ Tomi Hendra, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Quran*, (Hikmah Vol. XI, No. 02 Desember 2017, 30-50), hlm.48

⁴¹ Lihat Ester Boserup, *Woman's Role in Economic Development* (Great Britain: George Allen and Unwin, 1970); baca juga Barbara Rogers, *The Domestication of Women: Discrimination in Developing Societies* (London and New York: Routledge, 1980); Irene Tinker (ed.), *Persistent Inequalities: Women and World Development* (New York: Oxford University Press, 1990).

Development (WID) untuk memastikan integrasi perempuan dalam pembangunan. Namun demikian, Caroline Mosser mencatat bahwa pendekatan anti kemiskinan (*anti-poverty approach*) yang dipakai dalam WID untuk mencapai kesetaraan gender, lebih menekankan pada upaya mengurangi kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki karena dipercaya bahwa sumber ketidakadilan adalah kemiskinan, dan bukan sub-ordinasi.⁴² Menurut Geeta Chowdhry (1995) pendekatan anti kemiskinan dalam WID lebih difokuskan pada peran reproduksi perempuan, untuk perempuan perdesaan di dunia ketiga yang lekat dengan peran dan posisi konvensional perempuan sebagai istri atau ibu di rumah.⁴³ Jadi, WID justru tidak mengintegrasikan perempuan dalam modernisasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi malah meminggirkan perempuan.

Maka, melihat kecenderungan ini, para feminis di negara-negara dunia ketiga di Selatan (Global South Asia, Afrika, Latin Amerika) yang tergabung dalam *Development Alternatives with Women for a New Era* (DAWN) menyerukan agar WID diganti dengan Gender and Development (GAD)⁴⁴ untuk mengintegrasikan kepentingan perempuan dalam modernisasi dan pertumbuhan ekonomi, meskipun ternyata pendekatan anti-kemiskinan masih tetap digunakan. GAD berfokus pada hubungan politik atau relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki upaya untuk meningkatkan kuasa sosial politik perempuan dengan

⁴² Caroline Mosser, *Gender Planning in the third World: Meeting Practical and Strategic Needs*, dalam Rebecca Grant and Kathleen Newland (eds.), *Gender and International Relations* (Suffolk: Open University Press, 1991), hlm. 101.

⁴³ Geeta Chowdhry, *Engendering Development: Women in Development (WID) in International Development Regimes*, dalam Marianne H. Marchand and Jane L. Papart (eds.), *Feminism/Postmodernism/Development* (London and New York: Routledge, 1995), hlm 32.

⁴⁴ DAWN adalah forum kerja sama dan komunikasi antara perempuan di negara-negara dunia yang menyadari bahwa WID justru meminggirkan perempuan. Lihat DAWN, "*Rethinking Social Development: DAWN's Vision*," *World Development* 23, no.11(1996).

membenahi ketimpangan relasi tersebut.⁴⁵

Dalam perkembangannya sejak tahun 1980an, lembaga-lembaga donor internasional menggunakan kata ‘gender dan pembangunan’ termasuk kemudian merebak dalam term pemberdayaan perempuan (*women’s empowerment*) menggambarkan spirit yang lebih politis untuk melakukan transformasi, menentang struktur patriarki yang membelenggu peran dan posisi perempuan di negara-negara dunia ketiga.⁴⁶

Dalam perkembangan kekinian, kaum feminis khawatir dengan penggunaan istilah ‘pemberdayaan perempuan’ yang dalam praktiknya seringkali sekedar dimaknai sebagai upaya memobilisasi perempuan (umumnya) kelas bawah melalui program-program swakarsa untuk meningkatkan taraf ekonomi, partisipasi, tetapi tanpa memberikan kuasa untuk menentang narasi dominan dari pembangunan atau merumuskan jalan alternatif.⁴⁷

Diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya menjadi dasar bagi upaya pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri pemiskinan terhadap perempuan oleh ideologi gender patriarki memosisikan perempuan sebagai anggota masyarakat yang tidak beruntung dan kerap mengalami ketidakadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka ide utama pemberdayaan perempuan bermuara dari konsep pengarusutamaan gender, kesetaraan gender, dan keadilan.

⁴⁵ Kathryn Robinson, *Indonesian Women’s Rights, International Feminism and Democratic Change*, Communal/Plural 6, no.2 (1998), hlm 212.

⁴⁶ Srilatha Batliwala, *Taking the Power out of Empowerment: An Experiential Account*, Development in Practice, vol. 17, no. 4/5 (August 2007), hlm.558

⁴⁷ Elliot (2008) sebagaimana dikutip dari Manisha Desai, *Hope in Hard Times: Women’s Empowerment and Human Development*, United Nations Development Programme, Human Development Research Paper 2010/14, July 2010, hlm. 4.

Mayoux mengungkapkan bahwa pengarusutamaan gender sebagai berikut. *“Making women’s concerns and experiences integral to the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and social spheres”*⁴⁸. Lebih lanjut Mayoux mengungkapkan bahwa kesetaraan gender merupakan sebuah kondisi di mana perempuan memperoleh keadilan dan kesempatan yang sama, dan gender tidak lagi menjadi dasar diskriminasi dan ketidakadilan di antara masyarakat. Ini sejalan dengan pendapat Sen yang mengungkapkan bahwa perempuan sebagai *agent of change* memiliki peranan penting dalam upaya mengurangi kemiskinan.⁴⁹

Naila Kabeer mengetengahkan tiga dimensi pemberdayaan (perempuan), yaitu: pertama, *‘resources’* (*pre-condition*) meliputi tidak hanya sumber daya material tetapi juga sumber daya manusia, jaringan hubungan sosial dalam keluarga, pasar, masyarakat; kedua, *‘agency’* (*process*) sebagai kemampuan mendefinisikan tujuan dan mencapainya yang dapat berupa kemampuan melakukan negosiasi, tawar menawar dalam sebuah keadaan atau pengambilan keputusan, memanipulasi atau memainkan, yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama; ketiga, *‘achievements’* (*outcomes*). Kabeer merumuskan bahwa pemberdayaan perempuan (*women’s empowerment*) adalah proses dimana seseorang (perempuan) yang semula tidak memperoleh kesempatan melakukan pilihan strategis dalam hidupnya, kemudian mampu menguasai kemampuan

⁴⁸ Mayoux, Linda, *Gender Equity, Equality, and Women’s Empowerment. Principle, Development and Framework*. (Aga Khan Foundation, 2001), hlm. 6

⁴⁹ Sen, Amartya. *Development as Freedom*. (New York : Anchor Books, 1999), hlm. 12

tersebut.⁵⁰

Senada dengan Kabeer dalam Mayoux menyatakan bahwa terdapat lima unsur utama yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut:

1. *Welfare* (Kesejahteraan)

Aspek ini dapat dikatakan salah satu aspek yang penting dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam akses terhadap kesejahteraan, perempuan menempati posisi yang tidak menguntungkan. Kesejahteraan ini dibagi ke dalam tiga unsur utama berikut

- a. *Partisipasi ekonomi perempuan* merupakan hal yang penting tidak hanya mengurangi level kemiskinan pada perempuan, melainkan pula sebagai langkah penting untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendorong pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan.
- b. *Pencapaian pendidikan* merupakan aspek paling fundamental dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, tanpa memperoleh pendidikan yang memadai, perempuan tidak mampu mengakses pekerjaan sektor formal, mendapatkan upah yang lebih baik, berpartisipasi dalam pemerintahan dan mencapai pengaruh politik.
- c. *Kesehatan dan kesejahteraan* merupakan sebuah konsep yang terkait dengan perbedaan substansial antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses nutrisi yang cukup, kesehatan, fasilitas reproduksi, dan untuk mengemukakan keselamatan fundamental dan integritas seseorang.

⁵⁰ Naila Kabeer, *Resource, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment*, (Development and Change, Vol. 30, 1999), hlm. 437-438.

2. *Access* (Akses)

Dalam bahasa Longwe, akses diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk dapat memperoleh hak/akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, tenaga kerja, dan semua pelayanan publik yang setara dengan perempuan. Akses terhadap teknologi dan informasi juga merupakan aspek penting lainnya. Melalui teknologi dan informasi, perempuan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan sosial mereka dan mempengaruhi lingkungan tempat ia tinggal. Tanpa akses, pemahaman, serta kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi, perempuan miskin jauh lebih termarginalisasi dari komunitasnya, negaranya, dan bahkan dunia.

3. *Consientisation* (Konsientisasi)

Pemahaman atas perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender.

4. *Participation* (Partisipasi)

Kesetaraan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, dan administrasi. Partisipasi ini merujuk pada keterwakilan perempuan yang setara dalam struktur pembuatan keputusan baik secara formal maupun informal, dan suara mereka dalam penformulasian kebijakan mempengaruhi masyarakat mereka.

5. *Equality of Control* (Kesetaraan dalam kekuasaan)

Kesetaraan dalam kekuasaan atas faktor produksi, dan distribusi keuntungan sehingga baik perempuan maupun laki-laki berada dalam posisi yang dominan.

Di Indonesia keberadaan perempuan yang jumlahnya hampir seimbang dengan laki-laki membuat pendekatan pemberdayaan dianggap suatu strategi yang melihat perempuan bukan sebagai beban pembangunan melainkan potensi yang harus dimanfaatkan untuk menujung proses pembangunan. Pembangunan yang menyeluruh menuntut adanya peran serta laki-laki dan perempuan di segala bidang. Perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta dalam segala kegiatan pembangunan. Dengan demikian, perempuan sama halnya dengan laki-laki dapat menjadi sumber daya fisik lainnya sebagai penentu tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur dan sejahtera.

Feminisme dalam Islam tentu saja tidak menyetujui setiap konsep atau pandangan feminis yang berasal dari Barat, khususnya yang ingin menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Disisi lain, feminisme Islam tetap berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki, yang terabaikan di kalangan tradisional konservatif, yang menganggap perempuan sebagai sub ordinat laki-laki. Dengan demikian, feminisme Islam melangkah dengan menengahi kelompok tradisional-konservatif di satu pihak dan pro feminisme modern dipihak lain.

Feminisme Islam inilah yang oleh Mahzar disebut dengan Pasca Feminisme Islam Integratif, yang menempatkan perempuan sebagai kawan laki-laki untuk membebaskan manusia dari tarikan naluri kehevanan dan tarikan keserbamesinan

di masa depan.⁵¹ Feminisme Islam berupaya untuk memperjuangkan apa yang disebut Riffat Hassan “*Islam pasca-patriarkhi*”, yang tidak lain adalah dalam bahasa Riffat sendiri “*Islam Qur’ani*” yang sangat memperhatikan pembebasan manusia, baik perempuan maupun laki-laki dari perbudakan tradisionalisme, otoritarianisme (agama, politik, ekonomi atau yang lainnya), tribalisme, rasisme, seksisme, perbudakan atau yang lain-lain yang menghalangi manusia mengaktualisasikan visi Qur’ani, tentang tujuan hidup manusia yang mewujud dalam pernyataan klasik: kepada Allah lah mereka kembali. Tujuan Islam Qur’ani adalah untuk menegakkan perdamaian yang merupakan makna dasar Islam.

Tanpa penghapusan ketidaksetaraan, ketidaksejajaran dan ketidakadilan, yang meliputi kehidupan manusia, pribadi maupun kolektif, tidak mungkin untuk berbicara tentang perdamaian dalam pengertian yang diinginkan al-Qur’an.⁵² Gerakan feminisme Islam (*harakah tahrir al-mar’ah*) dalam sejarah Islam sendiri, khususnya di Indonesia, berlangsung dalam beberapa cara.⁵³

Pertama, melalui pemberdayaan terhadap kaum perempuan, yang dilakukan melalui pembentukan pusat studi wanita di perguruan-perguruan tinggi, pelatihan-pelatihan dan *training-training* gender, melalui seminar-seminar maupun konsultasi-konsultasi. Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki konsen dengan persoalan-persoalan keperempuanan, seperti P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren

⁵¹ Armahedi Mahzar, *Islam Masa Depan*, (Pustaka, 1993), hlm. 49

⁵² Riffat Hassan, *Perempuan Islam dan Islam-Pasca Patriarkhi* dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 1995), hlm. 99-100.

⁵³ Ahmad Baidowi, *Gerakan Feminisme dalam Islam*, (Jurnal Penelitian, Vol. X No 2, Mei-Agustus 2001), hlm. 211-213.

dan Masyarakat), Rifka An-Nisa WCC (Woman Crisis Centre), Yasanti (Yayasan Annisa Swasti) dan lain-lain. Selain itu, lembaga-lembaga dalam konsen ini juga dikenal dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan Negara yang dinilai merugikan keberadaan perempuan.

Kedua, melalui buku-buku yang ditulis dalam beragam tema, ada yang melalui fiqh pemberdayaan sebagaimana dilakukan Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan*,⁵⁴ yang ditulis dengan gaya dialog, melalui sastra, baik novel cerpen sebagaimana tampak dari karya-karya Nawal el-Sadawi seperti, *Perempuan di Titik Nol*,⁵⁵ *Memoar seorang Dokter Perempuan*⁵⁶ dan lain-lain atau Tsitsi dengan novelnya *Warisan*⁵⁷ dan sebagainya.

Ketiga, melakukan kajian historis tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sejarah masyarakat Islam, yang berhasil menempatkan perempuan yang benar-benar sejajar dengan laki-laki dan membuat mereka mencapai tingkat prestasi yang istimewa dalam berbagai bidang, baik politik, pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Karya-karya Fatima Mernissi yang berjudul *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*, karya Ruth Roded yang berjudul *Kembang Peradaban*, karya Hibbah Rauf Izzat yang berjudul *Wanita dan Politik dalam Pandangan Islam*, merupakan sebagian contoh dari gerakan feminisme jenis ini.

Keempat, melakukan kajian-kajian kritis terhadap teks-teks keagamaan, baik al-Qur'an maupun hadis, yang secara literal menampakkan ketidaksetaraan antara

⁵⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997)

⁵⁵ Nawal el-Sadawi, *Perempuan di Titik Nol*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991)

⁵⁶ Nawal el-Sadawi, *Memoar Seorang Dokter Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991)

⁵⁷ Tsitsi, *Warisan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994)

laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini dilakukan penafsiran ulang dengan pendekatan hermeneutic dan melibatkan pisau analisis yang ada dalam ilmu-ilmu sosial untuk menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara. Ini dilakukan sebagai alternatif terhadap penafsiran klasik yang cenderung mempertahankan makna literal teks-teks yang tampak patriarkhis tersebut. Fatima Mernissi, Amina Wadud Muhsin, Riffat Hassan dan Asghar Ali Engineer sangat intens dalam melakukan gerakan feminisme jenis ini.

Dalam bukunya yang diberi judul *Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik, Pendidikan*,⁵⁸ Jalaluddin Rakhmat menulis sebuah uraian tentang feminisme, ringkas dan sangat menarik. Setelah meninjau berbagai gerakan dan visi feminisme, Jalaluddin Rakhmat berkesimpulan: *“Walhasil, Islam sangat memuliakan perempuan. Orang Islam harus berjuang memuliakan mereka. Bila keadaan perempuan sekarang ini belum mulia, maka kaum muslim wajib mengubah masyarakat sehingga posisi mereka menjadi mulia. Jadi sampai disini orang Islam boleh dikatakan feminis.”*

David Jary dan Julia Jary menyebutkan salah satu pengertian feminis dengan teori atau praktek sosio politik yang bertujuan untuk membebaskan perempuan dari supremasi dan eksploitasi kaum laki-laki.⁵⁹ Merujuk pada pengertian “feminisme” yang dikemukakan David Jary dan Julia Jary tersebut, pernyataan Jalaluddin Rakhmat bahwa Islam mendukung feminis, bukanlah sesuatu yang berlebihan, karena Islam memang menentang ketidakadilan terhadap

⁵⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik, Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 42.

⁵⁹ David Jary dan Julia Jary, *Collins Dictionary of Sociology*, (Glasgow: Harper Collins Publisher, 1991), h. 223-224.

siapapun, termasuk ketidakadilan terhadap perempuan. Alih-alih, Islam justru mengajarkan agar ummat Islam memperjuangkan kemuliaan dan martabat perempuan yang sebelum kedatangan Islam tidak dihargai.

Muthahhari mencatat bahwa menurut Islam, perempuan dan laki-laki adalah sama-sama manusia dan keduanya mendapatkan hak-hak yang sama, tidak berbeda, atau dalam kata lain bisa disebut sebagai makhluk yang sebanding. Perempuan dan laki-laki tidak identik antara yang satu dengan yang lainnya dalam banyak aspek. Bagi Muthahhari, dunia tidak persis sama bagi perempuan dan laki-laki. Apa yang dihadapi perempuan dan laki-laki di dunia tidaklah sama. Maka, yang diperlukan tentu saja kesetaraan, bukan keseragaman.⁶⁰

Yvonne Yazbeck Haddad yang menegaskan bahwa al-Qur'an merupakan sumber nilai yang pertama kali menggagas konsep keadilan gender dalam sejarah panjang umat manusia. Diantara kebudayaan dan peradaban dunia yang hidup pada masa turunannya al-Qur'an, seperti Yahudi, Romawi, Cina, India, Persia, Kristen, dan Arab pra Islam, tidak satu pun yang menempatkan perempuan lebih bermartabat dan lebih terhormat daripada nilai-nilai yang diperkenalkan oleh al-Qur'an.⁶¹

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menegaskan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Ayat-ayat tentang prinsip kesetaraan gender itu bisa dirangkum ke dalam beberapa variable.

Pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, seperti

⁶⁰ Murtadha, Muthahhari, *Filsafat Perempuan dalam Islam: Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*, (Rausyanfikir Institute : Yogyakarta, 2012), hlm. 78

⁶¹ Yvonne Y Haddad, *Contemporary Islam and the Challenge of History*, (New York: State University of New York, 1980), hlm. 56.

tercantum dalam QS. al-Dzariyat : 56, QS. al-Hujurat : 13, QS. al-Nahl : 97.

Kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah dimuka bumi, seperti tercantum dalam QS. al-An'am : 165.

Ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dengan Tuhan, seperti tercantum dalam QS. al-A'raf : 172.

Keempat, Adam dan Hawa sama-sama terlibat dalam drama kosmis seperti terlihat dalam QS. al-Baqarah : 35,187, QS. al-A'raf : 20, 22,23.

Kelima, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi seperti tercantum dalam QS. Ali Imran : 195, QS. al-Nisa' : 124, QS. Ghafir : 40.

Selain ayat-ayat yang menekankan keadilan gender tersebut, praktek kehidupan sosial pada masa nabi diakui telah menempatkan posisi perempuan dalam kedudukan yang setara dengan laki-laki. Struktur patriarki pada masa jahiliyah dibongkar Islam, dengan memberikan hak-hak kepada perempuan yang pada masa sebelumnya tidak diberikan. Nabipun menyuruh umat Islam untuk mengadakan aqiqah untuk menyambut kelahiran anak perempuan, sebagaimana halnya anak laki-laki.

Jika pada masa jahiliyah, perempuan tidak diberi hak untuk mewarisi, bahkan menjadi harta yang diwariskan, Islam memberikan warisan kepada mereka QS. Al-Ni'sa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كثيرًا

Artinya : Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Berbeda dengan perlakuan masyarakat Arab Jahiliyah kepada perempuan, Islam menempatkannya dalam posisi yang sangat terhormat. Sehingga, pada masa Nabi ini tercipta relasi laki-laki dan perempuan yang ideal, dimana mereka benar-benar setara. Roded⁶² mencatat, bahwa perlakuan yang setara antara laki-laki dan perempuan itu telah memunculkan mereka mencapai prestasi sebagaimana yang diperoleh laki-laki. Menurutnya, dari ribuan sahabat Nabi, 1200 diantaranya adalah perempuan, mereka berhubungan langsung dengan Nabi. Ibnu Sa'ad menulis tentang 600 an perempuan-perempuan sahabat Nabi yang ikut menyemarakkan kota Madinah.⁶³ Fatima Mernissi juga mencatat adanya banyak perempuan yang berhasil menguasai tahta kekuasaan politik.⁶⁴

Sedangkan pemberdayaan perempuan menurut persepektif Islam adalah upaya pencerdasan muslimah hingga mampu berperan menyempurnakan seluruh kewajiban dari Allah SWT, baik di ranah domestik maupun publik. Kesalahan aktivitas perempuan diarahkan. Kesuksesan seorang perempuan di sektor

⁶² Ruth Roded, *Kembang Peradaban : Citra Wanita di Mata Para Penulis Biografi Muslim*, Penj. Ilyas Hasan (Bandung : Mizan, 1995)

⁶³ Ibnu Sa'ad, *The Woman of Madina*, Penerj. Aisha Bewley, (London: Taha Publishing Ltd, 1995)

⁶⁴ Fatima Mernissi, *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*, Penerj. Rahmani Astuti, Enna Hadi, (Bandung : Mizan, 1994)

domestik (rumah tangga) di tandai dengan berperanya perempuan dalam mengatur rumah tangga sesuai dengan aturan yang telah Allah turunkan. Perempuan yang mendidik anak-anaknya dan mengatur urusan rumah tangganya.⁶⁵

Dalam hal ini Mahmud Syaltut menulis: “Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir (dapat didapatkan) sama, Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki potensi dan kemampuan yang cukup agar masing-masing dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus”. Sebagaimana dalam surah AL-Nisa’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ طَلًّا فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya: Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Ayat ini menegaskan bahwa berbicara tentang kepemimpinan laki-laki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan

⁶⁵ Siti Muslikati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 131

rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak perempuan dalam berbagai segi, termasuk dalam hak kepemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami.⁶⁶

Islam membenarkan keterlibatan perempuan dalam pekerjaan, perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri ataupun bersama orang lain, dengan lembaga keuangan maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya, selama mereka membutuhkan pekerjaan dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Pekerjaan dan aktifitas yang dilakukan oleh perempuan di masa Nabi cukup beraneka ragam, misalnya Ummu Salim Binti Malham bekerja sebagai perias pengantin pada masa Nabi. Istri Nabi Khadijah binti Khuwailid dalam bidang perdagangan, dan masih banyak lagi contoh menyangkut perempuan yang bekerja dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Selain mengurus suami dan anak sesuai dengan kadar intelektual dan profesinya maka mereka berkewajiban melakukan pengabdian kepada masyarakat.⁶⁷ Agar hal tersebut dapat berjalan beriringan, maka perempuan dapat menentukan manakah dari sekian banyak

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), Hlm. 428

⁶⁷ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, (Karangasem: Era Intermedia, 2002), hlm. 70

kemaslahatan yang lebih penting dan harus dipecahkan pertama kali, misalnya dengan skala prioritas. Skala prioritas sebagaimana dijelaskan pada sosiologi menunjukkan bahwa penunaian tugas oleh perempuan atas tanggung jawab mengurus suami dan membahagiakan serta mendidik anak-anak agar menjadi anak soleh merupakan tingkat kemaslahatan yang paling tinggi atau merupakan tuntutan skala prioritas primer dalam konsep kemaslahatan masyarakat.

Dihadapkan dari realita ini jika dalam suatu kondisi perempuan dihadapkan kepada tugas dan kewajiban dan rumah tangga serta aktivitas keilmuan dan sosial lainnya, padahal dia tidak sanggup menunaikan keduanya dalam waktu bersamaan, maka yang harus dikerjakan berdasarkan retorika skala prioritas adalah menunaikan tugas dan kewajiban rumah tangga maka hal itu harus mengorbankan kepentingan lainnya.

Hal ini lebih jelas lagi ketika perempuan bekerja hanya untuk mengejar status sosial atau hanya demi kebanggaan terhadap masyarakat. Dalam kondisi semacam ini, perempuan harus mendahulukan kehidupan, seperti merawat dan mendidik anak-anaknya.

Islam merupakan agama yang universal, tidak hanya mengatur masalah ekonomi, sosial budaya, perdagangan dan lainnya, tetapi juga mengatur masalah manusia dunia dan akhirat, Islam tidak melarang penganutnya untuk bekerja, asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam Islam dengan bekerja merupakan sesuatu hal yang sangat dianjurkan. Apalagi jika bekerja dengan seorang mukmin tidak hanya dapat menghindarkan dirinya dari meminta-minta, tetapi juga dapat menafkahi orang tuanya yang sudah renta dan anak-anaknya

yang pada masih kecil. Beberapa anjuran mengenai bekerja terdapat dalam Surat Al-Mulk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ^ط وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

Artinya : Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu(kembali setelah) dibangkitkan.

Allah memberikan berbagai macam kekayaan alam dan muka bumi, hingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan makan, minum dan lain-lainnya. Segala bahan yang Allah telah sediakan dimuka bumi ini dengan mudah dapat diraih asalkan mau bekerja dengan keras. Jadi orang mukmin tidak boleh berpangku tangan menghadapi kehidupan.⁶⁸ Ayat diatas dengan tegas memerintahkan kepada manusia untuk bekerja keras agar mereka dapat hidup makmur. Perintah mengelola bumi untuk kemakmuran menunjukkan bahwa manusia wajib bekerja keras agar mendapatkan rezeki dari Allah SWT.

Pada dasarnya ajaran Islam sangat mendorong kepada kaum perempuan untuk bekerja keras bekerja secara optimal dan maksimal sesuai dengan kemampuan dan kodratnya. Karena itulah, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan pria dan perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk menyatakan pendapat dan aspirasinya. Bahkan sebagian dari mereka ada yang ikut berperang, mendukung tugas pria. Perempuan yang bekerja di luar rumah harus

⁶⁸ Muhammad Thalib, *Membangun Ekonomi Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), hlm. 234-235

bisa menginvestasikan waktunya secara sempurna dan menjadi komponen produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, perempuan yang bekerja tidak boleh sampai menelantarkan perealisasi tanggung jawab pokok dan paling utama bagi perempuan muslimah.

4) Teori Pengembangan Masyarakat Islam

Menurut definisi Ibnu Khaldun, secara etimologi pengembangan berarti membina dan meningkatkan kualitas. Masyarakat Islam berarti kumpulan manusia yang beragama Islam, yang meneliti hubungan dan keterkaitan ideologis yang satu dengan yang lainnya. Dalam pemikiran sosiologis, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia itu secara individu diberikan kelebihan namun secara kodrati manusia memiliki kekurangan. Sehingga kelebihan itu perlu dibina agar dapat mengembangkan potensi pribadi untuk dapat membangun.⁶⁹

Amrullah Ahmad, Nanih Machendrawati, dan Agus Ahmad mendefinisikan bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah suatu sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam. Menstransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (*usrah*) kelompok sosial (*jama'ah*), dan masyarakat (*ummah*). Model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal sholeh (karya terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

⁶⁹Muhtadi dan Tantan Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), hlm. 6

Pengembangan Masyarakat Islam menurut Ibnu Khaldun yang menyatakan konsep dan tujuan pengembangan masyarakat Islam yaitu individu, *ashabiyah*, masyarakat *ijtima' al-insani*, negara dan peradaban. Uraian tujuan pengembangan masyarakat Islam dimaksud sebagai berikut:

1) Individu.

Dalam pemikiran sosiologis, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia itu secara individu diberikan kelebihan, namun secara qudroti manusia memiliki kekurangan dan kelemahan di samping kelebihan yang dimiliki. Sehingga kelebihan itu perlu dibina agar dapat mengembangkan potensi pribadi untuk dapat membangun.

2) *Ashabiyah*.

Ashabiyah atau kekeluargaan merupakan sebuah kekuatan atas pertalian darah. Sikap kekeluargaan ini jika dibina dan diarahkan kepada penanaman jiwa keagamaan maka akan menghasilkan sikap yang positif mengarah kepada sikap religius untuk menjalankan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

3) Masyarakat *Ijtima' al-Insani*.

Sikap ini merupakan sikap saling membutuhkan, tolong menolong dan solidaritas maka terciptalah sistem sosial masyarakat yang tergabung dalam *al-ijtima' al insani*. Berkaitan dengan pengembangan masyarakat Islam maka masyarakat di sini diarahkan kepada terbentuknya masyarakat yang Islami.

4) Negara.

Negara dalam konteks ini merupakan suatu wadah dan alat, baik melalui pemimpin atau alat lainnya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang ideal sesuai dengan ajaran Islam.

5) Peradaban.

Tujuan akhir dari pengembangan masyarakat Islam adalah terwujudnya masyarakat madani (*civil society*), dengan nilai-nilai peradaban yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokratisasi, inklusivisme, independen, makmur dan sejahtera.⁷⁰

Empat strategi atau aktivitas utama dakwah Islam yang dilakukan adalah *bil Lisan* (dengan lisan), *bil Qalam* (dengan tulisan), *bil Qudwah* (dengan teladan) dan *bil Hal* (dengan aksi atau tindakan nyata)⁷¹, salah satu bentuk dakwah *bil Hal* adalah pemberdayaan masyarakat yang merupakan dakwah dalam bentuk aksi nyata. Upaya pemberdayaan masyarakat ditandai dengan menjadikan manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Islam menyebutkan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah dimuka bumi untuk membangun dan mengelola dunia sesuai dengan kehendak Allah. Islam merupakan agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sebagai agama gerakan atau perubahan:

⁷⁰Muhtadi dan Tantan Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), hlm. 8

⁷¹Asep Syamsul M. Romli, *Komunikasi Dakwah, Pendekatan Praktis*, (www.romeltea.com, 2013), hlm. 11

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Sering dikatakan bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah wujud dari dakwah bil Hal. Tokoh Amrullah Ahmad, Nanih Machendrawati, dan Agus Ahmad mendefinisikan bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah suatu sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam. Secara terminologis, pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Islam berarti mentransformasikan dan melembagakan semua sesuai ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (*usrah*), kelompok sosial (*jamaah*), dan masyarakat (*ummah*).⁷²

Pengembangan kemampuan seseorang dimulai dengan menciptakan suasana yang kondusif. Suasana yang kondusif akan menciptakan kondisi yang nyaman dan hati yang tenteram, keadaan ini akan merangsang pemikiran yang cemerlang. Suasana yang kondusif harus diciptakan agar masyarakat mampu mengembangkan ide dan kreativitasnya sehingga bisa menghasilkan produk yang bernilai. Pemberdayaan masyarakat mempunyai

⁷² Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 42

kesamaan dengan dakwah dalam bentuk aksi. Kemajuan akan diperoleh seseorang jika mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Hal ini sama seperti perintah Nabi yang memerintahkan semua orang untuk bekerja keras, beribadah taat, bersikap baik terhadap semua orang, menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat agar mampu melakukan perubahan perilaku ke arah kemandirian (berdaya). Pengembangan masyarakat memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya.⁷³ Semua komponen yang ada harus bersinergi untuk membantu masyarakat untuk keluar dari ketidakberdayaan. Untuk itu kerjasama dengan prinsip tolong menolong harus dikedepankan. Sesuai dengan firman Allah dalam QS Al Maidah ayat 2 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٰئِدَ
وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ اُنۡ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا
عَلَى الْبِرِّ وَالنَّفْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya,

⁷³Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Alfabeta, Bandung, 2019), hlm. 75

dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Konsep pemberdayaan sering dikaitkan dengan dakwah, dakwah dan pemberdayaan memiliki keterikatan yang cukup signifikan bahkan secara terperinci dapat dikatakan bahwa dakwah adalah proses pemberdayaan masyarakat. Makna dakwah sebagai proses pemberdayaan tidak terlepas dari tiga dimensi dakwah, yaitu makro, mezo, dan mikro.⁷⁴ Pemberdayaan pada tingkatan makro yaitu berupa hidayah, muatannya murni berupa al-Qur'an dan as-Sunnah.

Pemberdayaan pada tingkatan mezzo integral sebagai hasil penelaahan dari kandungan al-Qur'an dan as-Sunnah berupa metodologi yaitu konsep, teori dan kebijakan. Adapun pemberdayaan pada tingkatan mikro adalah aktualisasi berupa tindakan, kegiatan dan sebagainya yang berupa kerja nyata. Jadi, ketiga tingkatan makna dakwah yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat merupakan kesatuan yang saling berhubungan antara satu dan yang lainnya. Ketiganya saling melengkapi sehingga menciptakan satu tujuan yang padu untuk meraih keberhasilan.

⁷⁴Yasril Yazid dan Nur Alhidayatillah, *Dakwah dan Perubahan Sosial*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 106

Intinya dakwah dan pemberdayaan masyarakat sama-sama bertujuan untuk upaya perbaikan pada mutu hidup baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budayanya.⁷⁵ Menyelesaikan masalah yang ada termasuk masalah kesehatan masyarakat dengan berbagai pendekatan yang memungkinkan memperoleh solusi yang tepat. Memotivasi, mengingatkan, merangkul, mendampingi, bersahabat dengan masyarakat, inilah dasar dari dakwah dan pemberdayaan. Perubahan kearah yang lebih baik adalah tujuan utamanya. Beragam cara dan media yang digunakan menjadi strategi dalam pencapaian tujuan keduanya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai secara bertahap menurut Fauzie Nurdin⁷⁶, yaitu tahap pertama jika diarahkan agar mampu meningkatkan kesadaran kritis maka masyarakat diharapkan mampu membuat argumentasi dari berbagai macam eksploitasi sekaligus keputusan atas pilihan hidup dan masalah yang dihadapi. Pada tahap berikutnya masyarakat dapat menganalisis sendiri masalah mereka, mengidentifikasi penyebabnya, menetapkan prioritas dan memperoleh pengetahuan baru. Selanjutnya dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya lokal untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan dengan apa yang diteladankan Rasulullah SAW ketika membangun dan mengembangkan masyarakat, setidaknya harus ditempuh tiga

⁷⁵Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Alfabeta, Bandung, 2019), hlm. 109

⁷⁶Fauzie Nurdin, *Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Pengelolaan Resolusi Konflik*, (Panta Rhei Books, Jogjakarta, 2016), hlm. 29-30

tahapan atau fase pengembangan masyarakat Islam, yakni *takwin*, *tanzim* dan *taudi*'.⁷⁷ *Takwin* adalah tahap pembentukan masyarakat Islam. Kegiatan utama tahap ini adalah dakwah *bil lisan* sebagai ikhtiar sosialisasi *akidah*, *ukhuwah*, dan *la'awun*. Semua aspek tadi ditata menjadi instrumen sosiologis. Proses sosialisasi dimulai dari unit-unit terkecil dan terdekat sampai pada perwujudan-perwujudan kesepakatan. Sasaran tahap pertama ini adalah terjadinya internalisasi Islam dalam kepribadian masyarakat, kemudian mengekspresikannya dalam *ghirah* (semangat) dan sikap membela keimanan dari tekanan struktural (para penindas). Implementasi tahap *takwin* dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan adalah sosialisasi dan penyampaian informasi dengan berbagai metode dan media komunikasi (dakwah), secara konvensional, media cetak, media luar ruang, media elektronik maupun media sosial. Diharapkan terjadi pembentukan masyarakat dengan internalisasi perilaku hidup bersih dan sehat sampai adanya komitmen dan kesepakatan.

Dalam kerangka *community development*, Baiat Aqabah adalah semacam MoU (*Memorandum of Understanding*) yang akan ditindaklanjuti dengan *Memorandum of Agreement* (kesepakatan bersama untuk melaksanakan program bersama) *Baitul Aqabah* adalah kristalisasi interaksi *da'i* (pendakwah) dan *mad'u* (yang didakwah) yang paling fundamental yang melahirkan struktur hubungan sosial Islam. Kesepakatan (*bai'at*) antara *da'i* (pendakwah) dan *mad'u* (yang didakwahi) merupakan sunatullah dalam sejarah yang menentukan keberhasilan

⁷⁷Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Islam; Transformasi Sosial Berbasis Tauhid*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 149-152

dakwah Islam. Karena *bai'at* merupakan prinsip pengorganisasian Islam, maka adanya organisasi dakwah merupakan sunatullah untuk keberhasilan dakwah.

Tahap berikutnya adalah *tanzim*, yakni tahap pembinaan dan penataan masyarakat.⁷⁸ Pada fase ini internalisasi dan eksternalisasi Islam muncul dalam bentuk institusional Islam secara komprehensif dalam realitas sosial. Dalam perspektif strategi dakwah, hijrah dilakukan ketika tekanan kultural, struktural dan militer sudah demikian mencekam sehingga jika tidak hijrah, bisa terjadi involusi kelembagaan dan menjadi lumpuh. Nabi memulai gerakan penataan dakwah (*tandhim*) dengan hijrah. Hijrah, yang dapat diberi pengertian pemutusan keterikatan masyarakat dengan tanahnya, bisa mengubah pandangan manusia terhadap alam dan mengubahnya menjadi pandangan yang luas dan menyeluruh yang dapat menghilangkan kejumudan, kemerosotan sosial, pemikiran dan perasaan, sehingga masyarakat yang jumud menjadi dinamis. Dalam proses hijrah, masyarakat diajak memutus hubungan dari lingkungan dan tata nilai yang zalim sebagai upaya pembebasan manusia untuk menemukan jati diri yang fitri yang terendam dilingkungan sosiokultur yang tidak Islami.

Bila kedua tahap tadi sudah selesai dijalankan, masuklah pada tahap ketiga, yaitu *taudi'*, yang dimaksud dengan *taudi'* adalah tahap keterlepasan dan kemandirian.⁷⁹ Pada tahap ini, umat telah siap menjadi masyarakat mandiri terutama secara manajerial. Bila ketiga tahap ini selamat dilalui, bolehlah berharap akan munculnya suatu masyarakat Islam yang memiliki kualitas yang siap

⁷⁸Ajahari, *Pengembangan Masyarakat Islam; Anatomi, Proses, Tahapan dan Wilayah Pengembangannya*, (Jakarta, 2001)

⁷⁹Ajahari, *Pengembangan Masyarakat Islam; Anatomi, Proses, Tahapan dan Wilayah Pengembangannya*, (Jakarta, 2001)

dipertandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat lain dalam arena pasar bebas. Pada fase masyarakat mandiri atau disebut orang dengan masyarakat madani, pembebasan manusia dan dunia dari kemiskinan, konflik etnis, dan keagamaan dan juga penindasan atas nama Negara, ideologi politik bahkan agama. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa upaya dakwah bukan semata-mata proses mengenal manusia kepada Tuhannya, melainkan juga sebuah proses transformasi sosial.

Menurut Agus Efendi sebagaimana dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya *Pengembangan Masyarakat Islam*, mencoba menawarkan tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak.⁸⁰

Pertama, pemberdayaan pada matra ruhaniah. Pemberdayaan ini diperlukan karena degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan. Kepribadian umat Islam terutama generasi mudanya begitu mudah terkooptasi oleh budaya negatif “Barat” yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam dan tidak dapat memilahnya. Keadaan ini masih diperparah oleh gagalnya pendidikan agama di hampir semua pendidikan. Karenanya, umat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan desain kurikulum pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah Islamiyah.

Kedua, pemberdayaan intelektual. Saat ini dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan IPTEK. Keadaan ini juga diperparah dengan orientasi lembaga pendidikan yang ada mulai dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi lebih

⁸⁰ Nanih Mahendrawati, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam ; Dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001) hlm. 42.

banyak berorientasi pada bisnis semata, lembaga pendidikan dijadikan arena bisnis yang subur. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar dari pengembalian orientasi pendidikan pada pengembangan intelektual *an sich*.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Harus diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk memecahkannya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintahan dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri. Karenanya, diperlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi tersebut.

5) Lampung Berjaya

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 disebutkan bahwa Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah : “Rakyat Lampung Berjaya”.

Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh

sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
- b. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
- c. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana

pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.

- d. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2: Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

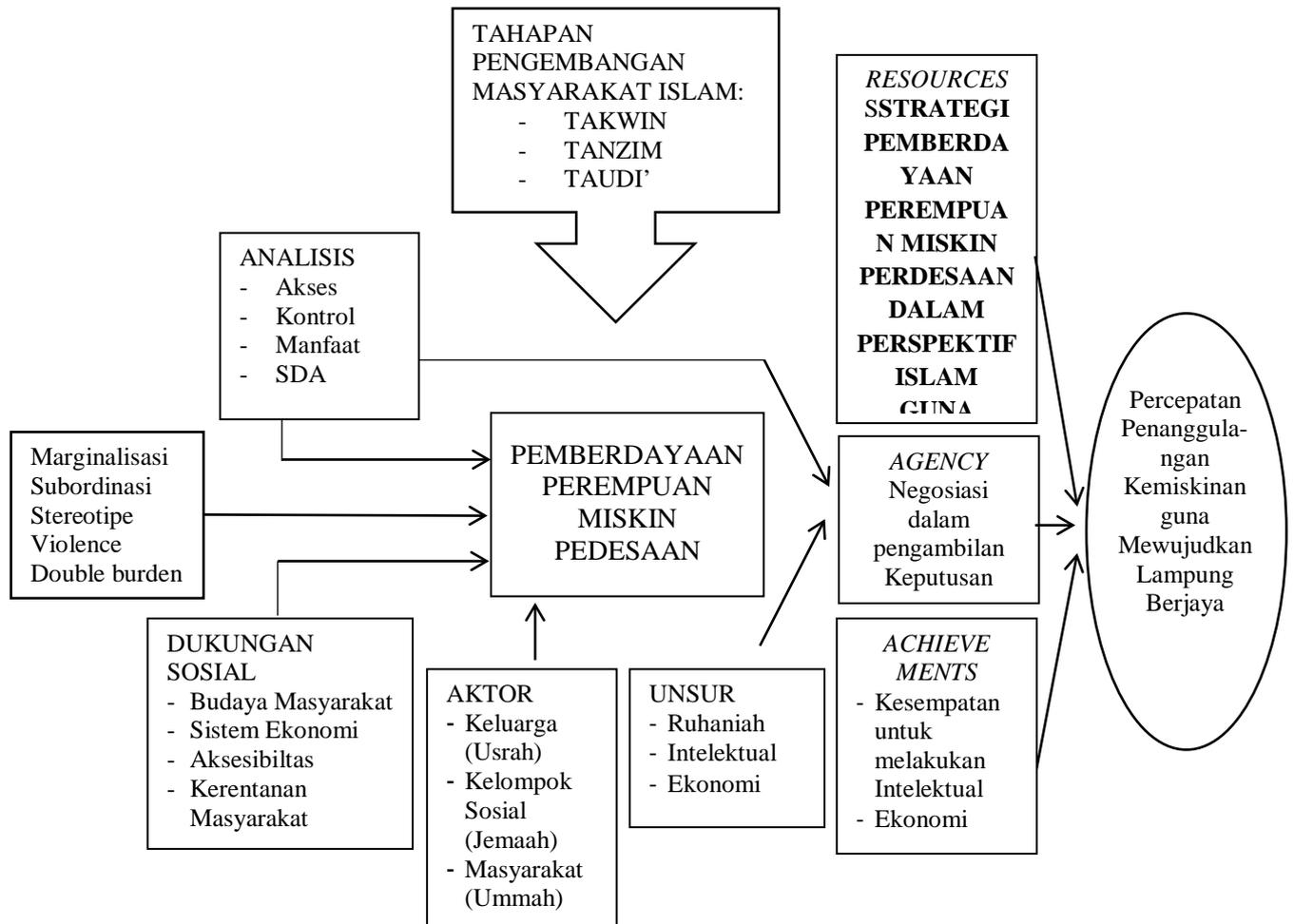
Pada misi ke-3 tersebut tercantum secara tersurat bahwa pemberdayaan perempuan menjadi salah satu prioritas pembangunan yang menjadi pekerjaan rumah di Provinsi Lampung periode 5 (lima) tahun ke depan.

Kerangka teori dalam penelitian ini berlandaskan pada kerangka relasi sosial yang dikemukakan oleh Naila Kabeer serta teori Nanih M, Agus A. Syafei tentang Pengembangan Masyarakat Islam, maka disampaikan kerangka pikir atau alur pikir penelitian ini guna mencapai pemberdayaan perempuan miskin pedesaan dalam perspektif pengembangan masyarakat Islam, sebagai berikut:

Dari tinjauan pustaka dan landasan teori diatas, yaitu teori relasi sosial yang dikemukakan oleh Naila Kabeer serta teori Nanih M, Agus A. Syafei, dan Agus Efendi tentang Pengembangan Masyarakat Islam maka disampaikan kerangka pikir penelitian ini agar mencapai keberhasilan Strategi Pemberdayaan Perempuan Miskin Pedesaan Dalam Perspektif Pencegahan *Stunting* dengan Pendekatan Keagamaan guna Mewujudkan Lampung Berjaya, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3

Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN DESAIN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Studi kualitatif secara eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Creswell mengemukakan “*research that is guided by the qualitative paradigm is defined as an inquiry process of understanding a social or human problem based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants, and conducted in a natural setting.*”⁸¹ Diartikan bahwa penelitian yang dibimbing oleh paradigma kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah.

Sedangkan desain penelitian menggunakan desain studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam, tentang seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), satu program kegiatan, atau situasi sosial dalam waktu tertentu yang tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam. Penelitian studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data

⁸¹ Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1994), hlm. 16

mengenai subjek yang diteliti. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁸²

Yin mendefinisikan studi kasus sebagai proses penelitian. “*A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon (the ‘case’) within its real-life context, especially when the boundaries between phenomenon and context may not clearly evident*”.⁸³ Sebuah studi kasus penelitian bertujuan untuk menguji pertanyaan dan masalah penelitian, yang tidak dapat dipisahkan antara fenomena dan konteks di mana fenomena tersebut terjadi.

Selanjutnya Yin mendefinisikan desain sebagai “*the logical sequence that connects the empirical data to a study’s initial research questions and, ultimately, to its conclusions,*” dan menyarankan empat tipe desain penelitian yang dapat digunakan. *Single holistic design, single embedded design, multiple holistic design dan multiple embedded design.* *Holistic design* membutuhkan satu unit analisis, sementara *embedded design* membutuhkan unit analisis ganda. Pada perspektif ini desain studi kasus terdiri dari lima komponen, yaitu pertanyaan penelitian, preposisi jika, unit analisis, logika yang menghubungkan data dengan analisis, kriteria untuk menafsirkan temuan. Komponen keempat dan kelima menjadi perhatian karena digunakan untuk merencanakan analisis data.

⁸² Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 201

⁸³ Yin, R. K. *Case Study Research: Design and Methods* (2nd ed.). (Thousand Oaks, CA: Sage, 2002) hlm. 16

Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai “researcher explores in depth a program, an event, an activity, a process, or one or more individuals”.⁸⁴ Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Creswell membagi penelitian studi kasus dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. *Penelitian Studi Kasus Instrumental Tunggal*, adalah penelitian studi kasus yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kasus untuk menggambarkan suatu isu atau perhatian. Pada penelitian ini, peneliti memperhatikan dan mengkaji suatu isu yang menarik perhatiannya, dan menggunakan sebuah kasus sebagai sarana (instrumen) untuk menggambarkannya secara terperinci.
2. *Penelitian Studi Kasus Jamak Penelitian (collective or multiple case study)* adalah penelitian studi kasus yang menggunakan banyak (lebih dari satu) isu atau kasus di dalam satu penelitian. Penelitian ini dapat terfokus pada hanya satu isu atau perhatian dan memanfaatkan banyak kasus untuk menjelaskannya. Disamping itu, penelitian ini juga dapat hanya menggunakan satu kasus (lokasi), tetapi dengan banyak isu atau perhatian yang diteliti. Pada akhirnya, penelitian ini juga dapat bersifat sangat kompleks, karena terfokus pada banyak isu atau perhatian dan menggunakan banyak kasus untuk menjelaskannya.

⁸⁴ Creswell, J. W., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions*. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1998), hlm. 16

3. *Penelitian Studi Kasus Mendalam (intrinsic case study)* adalah penelitian yang dilakukan pada suatu kasus yang memiliki kekhasan dan keunikan yang tinggi. Fokus penelitian ini adalah pada kasus itu sendiri, baik sebagai lokasi, program, kejadian atau kegiatan. Penelitian studi kasus mendalam ini mirip dengan penelitian naratif yang telah dijelaskan di depan, tetapi memiliki prosedur kajian yang lebih terperinci kepada kasus dan kaitannya dengan lingkungan disekitarnya secara terintegrasi dan apa adanya. Lebih khusus lagi, penelitian studi kasus mendalam merupakan penelitian yang sangat terikat pada konteksnya, atau dengan kata lain sangat terikat pada lokusnya.

B. SUMBER DATA

Menurut Lofland dan Lofland⁸⁵ sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data utama tersebut dapat diperoleh di rumah berikut keluarga beserta aktifitasnya, termasuk mereka yang memiliki kepentingan dan kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan terkait. Dalam penelitian ini mereka adalah: perempuan miskin pedesaan sebagai subjek dan objek pemberdayaan ekonomi, para pelaku, perancang, pelaksana serta penanggung jawab program pemberdayaan perempuan, serta beberapa *stakeholder* yang dapat mempengaruhi perspektif gender dalam masyarakat. Penelitian ini akan dilakukan pada tingkat kabupaten/kota yang dipilih yaitu

⁸⁵ Moleong L.J. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 157

Kabupaten Pringsewu sebagai wilayah kerja Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Pringsewu.

Informan dalam penelitian kualitatif ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau sampel bertujuan.⁸⁶ Dalam penelitian ini, pemilihan informan didasarkan kriteria dan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perencana, pelaksana, serta pendampingan program pemberdayaan perempuan miskin pedesaan dalam hal ini Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Pringsewu.
- b. *Stakeholder* yang dapat mempengaruhi perspektif gender dalam masyarakat.
- c. Perempuan miskin pedesaan sebagai pelaksana (subjek) maupun sasaran (objek) program pemberdayaan perempuan.

Tabel 5

Daftar Informan dan Lokasi Penelitian

Topik	Lokasi – Informan	Cara	Instrumen	Ket.
Perencana, Pelaksana dan Pendampingan	Kecamatan: 1) Penyuluh Agama 2) Pimpinan PAC NU 3) Pimpinan PAC Fatayat NU dan pengurus (2 Kecamatan @ 5 org)	Diskusi kelompok fokus (FGD)	Panduan FGD	10 orang
Suasana yang mendukung	Kabupaten: 1) Ka Bappeda 2) Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 3) Ka. Kantor Kemenag	- Wawancara mendalam - Telaah Dokumen	- Panduan wawancara mendalam - Check List	3 orang

⁸⁶ Ibid, hlm. 224

Topik	Lokasi – Informan	Cara	Instrumen	Ket.
	Kecamatan: 1) Camat 2) Ka. KUA (2 Kecamatan)	- Wawancara mendalam - Telaah Dokumen	- Panduan wawancara mendalam - Check List	4 orang
	Kabupaten: 1) Ketua MUI 2) Ketua PCNU 3) Ketua Fatayat NU	Wawancara mendalam	Panduan wawancara mendalam	3 orang
Pemberdayaan Masyarakat	1) Perempuan Miskin 2) Suami/Keluarga terdekat (2 Kecamatan @ 5 org)	- Wawancara mendalam - Observasi	- Panduan wawancara mendalam - Checklist Observasi	10 orang

Informan dalam kajian ini yaitu Kepala Bidang Ekonomi Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu dan informasi yang didapatkan adalah tentang gambaran dari pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pendampingan untuk pemberdayaan kepada masyarakat. Lalu, Kepala Bidang Perindustrian dari Klinik IKM Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu, yang mendampingi kelompok-kelompok usaha dan untuk informasi yang didapatkan adalah tentang gambaran dari pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pendampingan untuk pemberdayaan kepada masyarakat.

Selanjutnya pengurus organisasi Muslimat NU, yaitu Ketua PC I dan Sekretaris Muslimat NU, dan informasi yang didapatkan adalah mengenai gambaran dari organisasi Muslimat NU dan program-program yang dikerjakan, yang berkaitan

dengan pemberdayaan perempuan. Kemudian, peserta *Focus Group Discussion* yang terdiri dari anggota-anggota Muslimat NU yang mempunyai usaha, baik berwirausaha untuk penghasilan tambahan ataupun penghasilan utama, dengan rentang usia dari 37 sampai dengan 58 tahun.

C. METODE ATAU TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Sumber bukti yang digunakan dalam pengambilan data berasal dari berbagai sumber, Yin menyarankan peneliti menggunakan :

1. Dokumen, dapat berbentuk arsip, seperti catatan layanan, catatan organisasi, daftar nama, hasil survei.
2. Wawancara, merupakan sumber paling penting. Bentuk wawancara terbuka, yaitu partisipan berkomentar tentang peristiwa tertentu, mereka dapat mengusulkan solusi atau memberikan wawasan atas suatu peristiwa, menguatkan bukti dari sumber lain. Wawancara terfokus/terstruktur digunakan dalam situasi di mana partisipan diwawancarai untuk jangka waktu tertentu untuk menjawab pertanyaan yang ditentukan.
3. Observasi langsung dilakukan ketika kunjungan lapangan selama studi kasus dan lebih handal jika dilakukan lebih dari satu orang. Pengamatan partisipan dapat dilakukan untuk membuat peneliti terlibat aktif.
4. Artefak, berupa bukti fisik lain yang dikumpulkan selama pengambilan data lapangan.⁸⁷

⁸⁷ Yin, R. K. *Case Study Research: Design and Methods* (2nd ed.). (Thousand Oaks, CA: Sage, 2002) hlm. 39

Salah satu teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) baik dilakukan secara tidak terstruktur maupun semi terstruktur dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*). Selain itu juga dilakukan observasi terhadap interpretasi dan perilaku masyarakat serta telaah dokumen terkait kebijakan, program dan kegiatan yang berjalan.

Adapun rangkaian pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut:

- a) Mempersiapkan panduan wawancara mendalam pertanyaan secara semi terstruktur, daftar dokumen-dokumen yang akan ditelusuri, dan list observasi serta panduan *Focus Group Discussion* (FGD), untuk kemudian mengurus izin penelitian lapangan.
- b) Melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap informan yang telah ditentukan dan diperlukan.
- c) Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperkuat dan memperluas data dan informasi yang dibutuhkan. FGD akan dilakukan kepada para Penyuluh Agama, Pimpinan PAC NU, Pimpinan PAC Fatayat NU dan pengurus di 2 (dua) Kecamatan.
- d) Observasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik pada persiapan kegiatan, perencanaan, pelaksanaan serta pendampingan program pemberdayaan didasarkan pada panduan *checklist* observasi.
- e) Melakukan penelusuran dokumen yang diperlukan, dan objek atau sasaran yang telah ditentukan. Pelaksanaan telaah dokumen yang ada ditujukan pada pada beberapa fokus yaitu: dokumen perencanaan, laporan persiapan kegiatan,

dan laporan pelaksanaan kegiatan serta pendampingan, dengan berpedoman pada *check list* yang telah dibuat.

- f) Temu ahli untuk melakukan konfirmasi dengan para ahli seperti ulama dan ahli dari perguruan tinggi. Kegiatan kajian dari beberapa bidang keilmuan ini dimaksudkan untuk:
 - a. *Cross check* dari hasil penelitian kualitatif dan kajian literatur, juga sebagai triangulasi sumber.
 - b. Mendapatkan masukan dari para ahli tentang Strategi Pemberdayaan Perempuan Miskin Perdesaan dalam Perspektif Islam guna Mewujudkan Lampung Berjaya.

D. METODE ANALISIS DATA

Pengolahan dan analisa data dilakukan sejak akan memasuki lapangan penelitian, selama penelitian dan setelah selesai penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, analisa data difokuskan selama proses penelitian lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Bogdan dan Biklen (1982)⁸⁸, mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

⁸⁸Moleong L.J. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 248

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁸⁹ Adapun prosedur dalam pengolahan dan analisa data yang akan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Dari hasil pengumpulan data setiap hari, dapat dilakukan pengolahan dan pembuatan draf matriks hasil, agar dapat diketahui perlu tidaknya adanya pengembangan pengumpulan data lebih lanjut, baik jenis maupun sumber informasinya maupun memperkaya kembali informasi yang ingin digali lebih banyak termasuk kepada sumber informasi yang lain (*snowball*) sampai datanya jenuh. Hal tersebut merupakan salah satu upaya validitas informasi dengan cara triangulasi jenis data maupun sumber data yang ada. Selain triangulasi data, juga akan dilakukan uji *convirmability*, yaitu dengan melakukan konfirmasi kepada tokoh maupun pelaku yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan miskin pedesaan.
- 2) Data yang dihasilkan akan dilakukan reduksi data yang dilakukan dengan abstraksi yang merupakan upaya membuat rangkuman pernyataan-pernyataan yang perlu tetap dijaga. Kemudian menyusunnya dalam satuan-satuan. Dari satuan-satuan yang ada dan dibuatkan koding, pada tahap akhir akan dilakukan pemeriksaan keabsahan data.
- 3) Analisis atau penafsiran data dan informasi yang dihasilkan diselaraskan dengan tujuan penelitian, setelah dilakukan reduksi dan abstraksi data, maka langkah selanjutnya dilakukan display data yaitu dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan lain sebagainya. Dengan display data akan

⁸⁹Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. *Analisis Kualitatif; Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. (Jakarta, UI Press, 1992), hlm. 16

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahaminya tersebut. Kemudian dari hasil yang telah didapat akan dilakukan konklusi atau penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Selain itu digunakan pula analisis gender model Sara H. Longwee dalam Muttalib dengan "Kerangka Pemampuan Perempuan" yang mendasarkan pada pentingnya pembangunan bagi perempuan. Pemberdayaan perempuan mencakup tiga hal: (1) *capacity building* bermakna membangun kemampuan perempuan; (2) *cultural change* yaitu perubahan budaya yang memihak kepada perempuan; (3) *structural adjustment* adalah penyesuaian struktural yang memihak perempuan.⁹⁰ Upaya pemberdayaan diarahkan pada tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui kesetaraan gender. Kriteria analisis yang digunakan dalam metode ini terdiri atas 5 (lima) kriteria, yaitu: (1) kesejahteraan; (2) akses; (3) penyadaran; (4) partisipasi; dan (5) kontrol.

Jaga mutu yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi teori/data;
- 2) Membuat kriteria yang jelas saat memilih atau rekrutmen fasilitator untuk diskusi kelompok terfokus (FGD) dan wawancara mendalam;
- 3) Melakukan pelatihan terlebih dahulu pada fasilitator;
- 4) Menyusun panduan atau petunjuk teknis untuk wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD);

⁹⁰ Muttalib, Jang A. 1993. Menggunakan Kerangka Pemampuan Wanita, dalam Moeljarto Tjokrowinoto, dkk. Bahan Pelatihan Jender dan Pembangunan. Kantor Menteri Negara UPW.

- 5) Melakukan uji coba panduan wawancara mendalam dan panduan FGD sebelum digunakan;
- 6) Pengolahan dan analisis data kualitatif dengan konten analisis yang dilakukan oleh 2 (dua) orang.

Dalam rangka jaga mutu hasil penelitian kualitatif dilaksanakan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Denzin (1978)⁹¹ membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini dilaksanakan triangulasi sebagai berikut:

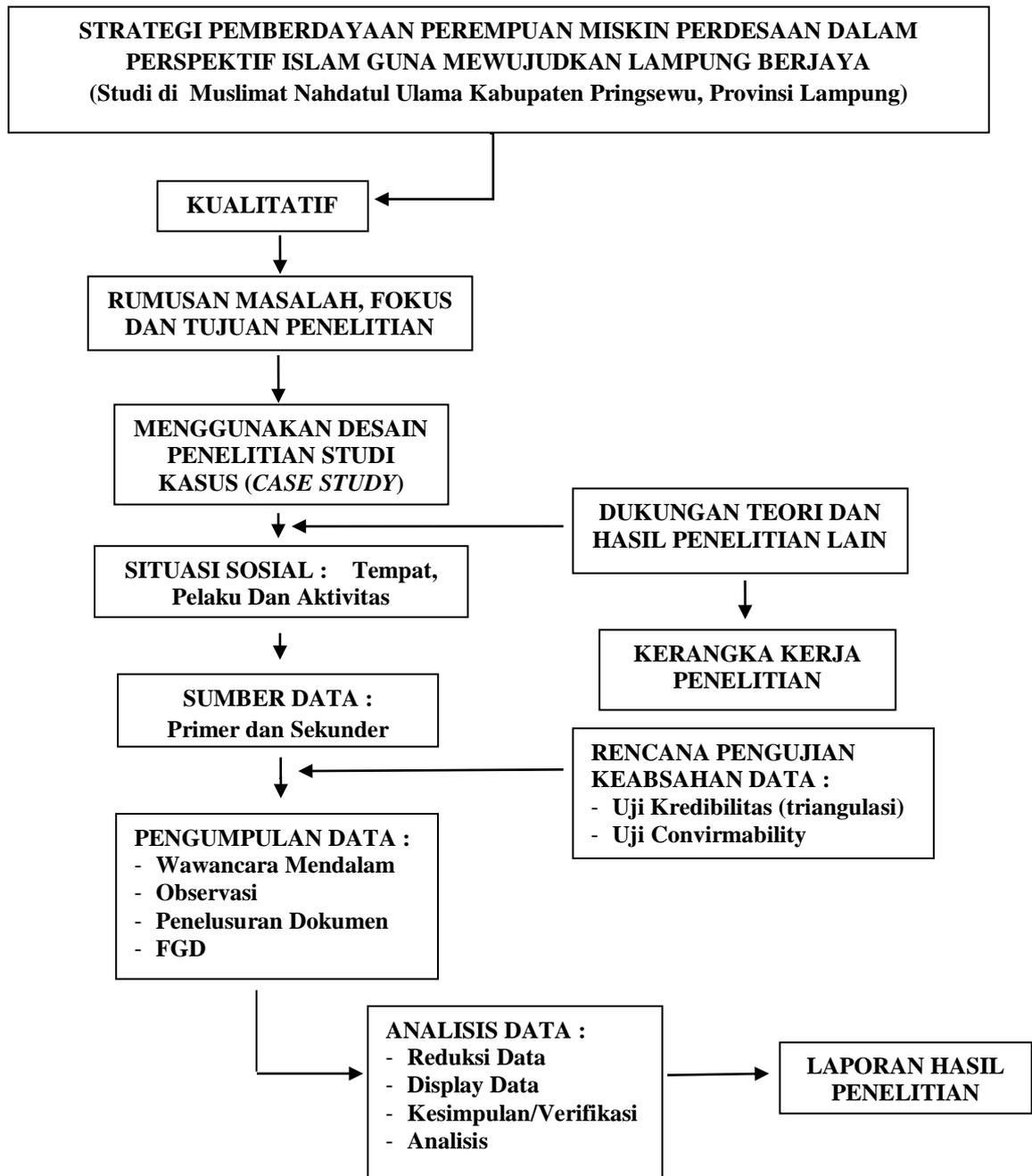
- 1) Triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dari berbagai unsur dan tingkatan. Selain itu juga triangulasi sumber yang dilakukan yaitu dengan membandingkan hasil wawancara mendalam dan FGD dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (data sekunder).
- 2) Triangulasi metode yaitu dengan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dari teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan diskusi kelompok terfokus (FGD), serta dengan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama yaitu pada wawancara mendalam maupun FGD.
- 3) Triangulasi teori atau data yaitu dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori atau data lain, sebagaimana menurut Patton (1987)⁹² bahwa triangulasi dengan teori ini dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*).

⁹¹Moleong L.J. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 330

⁹²Moleong L.J. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 331

Gambar 4

Langkah-langkah Penelitian



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

- **Peran Perempuan pada Sektor Ekonomi**

Ibu Margayani selaku Kepala Bidang Ekonomi Perempuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu menyatakan bahwa di daerah ini rata-rata perempuan memang bekerja dan perempuannya sangat kreatif, maka mayoritas bekerja sebagai wirausaha dan sebagian besar kegiatan produktif perempuan di Kabupaten Pringsewu bersifat informal.

Senada dengan hal tersebut, Ibu Sulisty Ningsih sebagai Kepala Bidang Perindustrian dari Klinik IKM Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu mengatakan bahwa perempuan-perempuan di daerah ini mempunyai kebebasan dalam bekerja dalam sektor ekonomi, sehingga banyak sekali yang mempunyai industri-industri kecil, dan di beberapa kecamatan yang ada terdapat klaster-klaster kelompok usaha yang sudah dibagi oleh Dinas Koperindag. Mulai dari kelompok usaha dengan klaster pemula, lalu kelompok usaha dengan klaster 5 tahun, kemudian ada kelompok usaha dengan klaster lebih dari 5 tahun.

Selanjutnya Ibu Margayani juga menyampaikan bahwa dari sekian perempuan yang berperan dalam sektor ekonomi secara informal, terdapat juga kelompok usaha yang sudah formal dengan cakupan usaha yang besar dan luas. Beberapa kelompok usaha tersebut diantaranya yang menghasilkan produk yaitu kerajinan manik-manik, kerajinan tapis dari Desa Lugusari Kecamatan Pagelaran Utara, kerajinan kain perca dari Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas, keripik pisang merk Panda Tirai, makanan ringan merk Rabbani dari Desa Mataram Baru, makanan ringan merk Raffin's, dan dodol merk Mandiri dari Desa Podorejo.

Gambar 5. Hasil Produk Beberapa Kelompok Usaha





Sumber: Observasi Hasil Penelitian dari Dinas Koperindag Kabupaten

Pringsewu, 2021

Ibu Sulistyو Ningsih menambahkan bahwa bidangnya ini menangani Industri Kecil Menengah (IKM) bukan Usaha Kecil Menengah (UKM). IKM tarafnya masih di bawah UKM, karena IKM khusus pelaku industri atau produksi. Sementara UKM jangkauannya lebih luas mencakup industri dan usaha-usaha lainnya, tidak hanya pelaku industri.

Gambar 6. Data IKM yang Terdaftar di Dinas Koperindag

DIREKTORI PERUSAHAAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH JENIS MAKANAN
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA	ALAMAT	KECAMATAN	TELEPHON	KLASIFIKASI INDUSTRI (BESAR/ KECIL)	KAPASITAS PRODUKSI	JUMLAH TENAGA KERJA	PERUIJINAN	PRODUK UTAMA (GENIS PRODUK)
1	PAWON SJ	Sari Istiqomah	Pringsewu Utara	PRINGSEWU	08127345976	RT				Kerupuk, aneka snack, minuman tempah bubuk
2	DOODL MANDIRI	Yani	Podomoro	PRINGSEWU	08238519936	Kecil			PIRT	Dodol
3	PANDA TIRAI	Siti Aminah	Jl. SMAN 1 Gadingrejo Rt/Rw 09/02 Wonodadi Utara	PRINGSEWU	08128735250	Kecil			PIRT, Halal	Keripik Pisang Aneka Rasa
4	PUTRI ANEKA RAGAM	Asti Asmawati	Jl. Pahlava No. 406 RT/Rw 04/02 Pringlumpuh, Pringsewu Selatan	GADINGREJO	085380719969	Kecil			PIRT, Halal	Keripik Pisang Aneka Rasa, Keripik Tempa
5	TIKA ANGKONAN	Sulastr	Dusun pematang Beriga RT/Rw 001 / 007 Tanjungasta	PARDASUKA	086696416513	RT				Kerupuk kulit kacang
6	KERIPIK FAMOUS	Maslihuah	Bandung Baru Kec. Adiluwih	ADILUWIH	086645183310	RT				Keripik, Singkong, Keripik Talas, Keripik Tempa
7	JAMUR TIRAM CRISPY	Tino Yuliani	pekem sukoyoso m05/03	SUKOHARJO	08127029826	RT				Keripik jamur
8	MEKAR SARI	Melinda Utami	Kediri	GADINGREJO	081368361083	RT				Rengginang
9	GREMET-GREMET	Dra. Ferry Estikawati	Jl. Inam Bongol No. 900 Pajanesuk	PRINGSEWU	081317438106	RT				Aneka Peyek
10	RAVINS	Rospawati	Jl. Jend. Sudirman No 2, RT/Rw 03/03 Pajanesuk	PRINGSEWU	081369269389	Kecil			PIRT, Halal, TCI	Keripik kulit ikan, aneka snack Bumbu, abon' lele, baby fish, sisk lele, lele krispi, naget lele
11	PRODUK OLAHAN IKAN ERWINA	Nina Anriyani	Jl. ikan nita RT/Rw 002/002 Pagelaran	PAGELARAN	085378711654	Kecil			PIRT, Halal, TCI	Aneka Kue Kering dari Bumbu
12	NK Utama	Tri Rahayu	Jl. Makam Gumuk Rejo RT/Rw 001/1, 002 Pringombo Timur	PAGELARAN	08237694911	RT			PIRT, Halal, TCI	Semping Miki Aneka Rasa, Koci Bubuk
13	GAYATRI KUE KERING	Hj. Opsah M	Jln. Melati 1 Lk. Pringombo 1 Pringsewu Timur	PRINGSEWU	08127228314	Kecil			PIRT, Halal	Aneka Kue Kering dari Bumbu
14	RESTU COOKIES	Rahmiyati	Pringombo III RT/Rw 01/03 Pringsewu Timur	PRINGSEWU	082371138453 085369728866	RT				Aneka kue kering

15	DAWUN WAREE	Ev Rianto	Jl. Hidayat Cg. Semp RT/Rw 026/06 Pringsewu Barat	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue Coklat Biskuit
16	MBA FOOD & COOKIES	El Komari	Pajanesuk Timur RT/Rw 003/03	PRINGSEWU	0858388765	kecil			PIRT	Kue, kue, Biskuit
17	Mak Mle	Mak Mle Wizar Abd Rabbil Fajar Ageng	Pajanesuk Timur RT/Rw 003/03	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
18	Mak Yu Jans	Chalaba	Jl. Lay. Ws. Rt/Rw 01 Pringlumpuh Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085848476	kecil				Sari, lele, abon' lele
19	Mak Gede Ti Makur	Nurhaji	Jl. Nurhaji RT/Rw 05/05 Sarung	PAGELARAN	085786788	kecil			PIRT, TCI	Kue, kue, Biskuit
20	Nurani	Kiki Lesari	RT/Rw 01/04 Pajanesuk Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
21	Marsa Sari Lampung Aneka Peranakan	Syahrani	Jl. Peranakan Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
22	Wang Tazaki	Ayul An Agan	Pringombo III RT/Rw 01/03 Pringsewu Timur	PRINGSEWU	08536972886	kecil				Kue, kue, Biskuit
23	Katka	Arasidani	Long Sate RT/Rw 02/03	SUKOHARJO	08238519936	kecil				Kue, kue, Biskuit
24	Bonsa Siger	Ika Nurwati	Wagap RT/Rw 03/03	PAGELARAN	08238519936	kecil				Bonsa Siger Biskuit
25	Rumel Aker	Pringgang	Karang Lembang RT/Rw 02/02	SUKOHARJO	08238519936	kecil				Kue, kue, Biskuit
26	Gawang Cakoe	Mari Ratumanan A Mar	Sukoharjo RT/Rw 01/03	SUKOHARJO	08238519936	kecil			PIRT	Kue, kue, Biskuit
27	Dapur Mak Dya	Eva Lukit	Pringsewu RT/Rw 01/03 Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
28	Rund Mergih Pih Dhe	Pringasa Dhuahati	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	08536972886	kecil				Kue, kue, Biskuit
29	Mak Semping Sari Fami	Siti Fatmahan	Sukoharjo	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
30	Kopi Pongol	Kurniasari	Jl. Sukoharjo Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
31	Mak Pajanesuk Aneka Coklat	Anggras Sari RT/Rw 01/03	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
32	Mak Sari	Sandi Nugrah	Pringsewu RT/Rw 01/03 Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	08536972886	kecil				Kue, kue, Biskuit

DIREKTORI PERUSAHAAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH JENIS MAKANAN
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021

33	Pringsewu Di Tici	Tri Rahayu	Jl. Pringsewu RT/Rw 01/03 Pringsewu Timur	PRINGSEWU	08536972886	kecil				Kue, kue, Biskuit
34	Makur Pajanesuk	Makur	Pajanesuk	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
35	Sriwati	Endang Sriwati	Pringsewu RT/Rw 01/03 Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
36	Riki Lusi	Pulihastuti	Jl. Lusi RT/Rw 01/03 Pringsewu Barat	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
37	Dak Mak Agi	Indragusti	Pringsewu RT/Rw 01/03 Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
38	Makur Pajanesuk	Rita Citra	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
39	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
40	Aneka Kue Kering	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
41	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
42	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
43	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
44	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
45	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
46	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
47	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
48	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
49	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
50	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
51	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
52	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
53	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
54	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
55	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit

56	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
57	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
58	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
59	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
60	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
61	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
62	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
63	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
64	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
65	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
66	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
67	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
68	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit

DIREKTORI PERUSAHAAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH JENIS MAKANAN
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021

69	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
70	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
71	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
72	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
73	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
74	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
75	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
76	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
77	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
78	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
79	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit
80	Makur Pajanesuk	Pringgang	Pringsewu Selatan	PRINGSEWU	085786788	kecil				Kue, kue, Biskuit

Pendapat tersebut sejalan dengan Ibu Nurul salah satu pelaku usaha dan jamaah dari Muslimat NU yang mengawali wirausahanya pada tahun 1980an dari konveksi kemudian bergabung dengan wirausaha industri, berpendapat bahwa wirausaha yang beliau kembangkan bermula hanya sebagai usaha sampingan namun seiring waktu, berkembang dan menambah penghasilannya.

Ibu Muhliana selaku Ketua PC 1 Muslimat NU menyebutkan bahwa dari Muslimat sendiri menghimbau untuk belajar mengembangkan *home industry*. Pada tahun 2021 ini, Muslimat NU lebih menggalakkan *home industry*, berhubung masih pandemi *Covid-19* dan agar ekonomi segera bangkit. Kalau ekonomi menurun, secara organisasipun tidak akan berjalan, karena dalam organisasi semua hal membutuhkan biaya. Berfokus pada bagaimana caranya menghidupkan Muslimat. Muslimat bukanlah sebuah instansi melainkan sebuah organisasi agar jamaah punya kesadaran, dan bisa berbagi untuk mencari jalan ke akhirat dengan bersedekah dan terus memperbanyak ilmu agar bisa menambah penghasilan keluarga.

Ibu Marfuah selaku sekretaris Muslimat NU juga menambahkan bahwa anggota atau jamaah dalam organisasi Muslimat NU ada puluhan ribu, dimana terdapat bidang pendidikan, kesehatan, organisasi, dakwah, agrobisnis ekonomi dan koperasi, ketenagakerjaan, advokasi dan hukum. Maka untuk pengembangan *home industry*, ada beberapa bidang dan dinas

terkait yang bekerjasama, seperti bidang agrobisnis ekonomi dan koperasi bekerjasama dengan bidang ketenagakerjaan untuk pengembangan pemberdayaan ekonomi perempuan, dimana kegiatan tersebut sama dengan membuat lapangan kerja untuk yang memiliki keterampilan dalam membuat kue. Namun, untuk *home industry* atas nama Muslimat belum terdaftar di perindustrian, masih dalam proses.

Ibu Muhliana juga menyebutkan bahwa sebelumnya pada tahun 2016 dalam kegiatan ekonomi penguatannya bukan *home industry*, melainkan masih belum terstruktur yang mengarah ke ekonomi. Namun, sekarang karena pandemi *Covid-19* ini, jadi mempunyai rasa untuk membangkitkan perekonomian jamaah.

Selanjutnya Ibu Marfuah juga berpendapat bahwa berkenaan dengan kontribusi kegiatan ekonomi perempuan muslim di Kabupaten Pringsewu ini belum terlalu terlihat, karena masih dalam tahap perencanaan. Muslimat NU mempunyai rencana untuk membuka outlet sebagai wadah penghasil dari para pengrajin. Hal tersebut tentu akan membawa atau menjadi kebanggaan daerah.

- **Kondisi Sosial Budaya Masyarakat**

Ibu Margayani selaku Kepala Bidang Ekonomi Perempuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,

dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu berkata bahwa mayoritas di Kabupaten Pringsewu ialah suku Jawa dan agama Islam.

Kemudian Ibu Sulistyo Ningsih sebagai Kepala Bidang Perindustrian dari Klinik IKM Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu juga menambahkan bahwa sebelum pandemi terkadang ada jadwal setiap minggu pagi dengan agenda “*ngeruput*”, dimana warga sekitar jalan-jalan pagi sambil bersilahturahmi. Kemudian ada juga agenda setiap jumat pagi yaitu Pasar Tani di kawasan pemerintah kabupaten dengan menjajakan produk-produk hasil kelompok usaha.

Selanjutnya, Ibu Margayani juga mengemukakan bahwa selama ini tidak pernah ditemukan adanya hambatan mengenai perempuan yang berekonomi terutama dalam sosial dan budaya.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Ibu Sulistyo Ningsih juga berkata bahwa sampai saat ini tidak ditemukan kasus terkait larangan perempuan berekonomi dari segi sosial dan budaya, karena pada faktanya suami-suami dari mereka malah mendukung dan membantu untuk mengumpulkan bahan baku produksi.

Ibu Siti Maisyaroh, salah satu pengrajin tapis di Desa Lugusari berpendapat bahwa tidak ada batasan budaya tentang berkeonomi, selama perempuan

jujur dalam meminta izin pasti suami mendukung perempuan untuk beraktivitas ekonomi.

Ibu Muhliana selaku Ketua PC 1 Muslimat NU berpendapat bahwa daerah Pringsewu ini banyak sekali perempuan yang ingin bergabung, karena program dalam Muslimat NU lebih berfokus pada pengembangan kinerja perempuan. Namun terdapat syarat keanggotaan, yaitu pada usia 17-40 tahun termasuk di fatayat pemuda dan pemudinya atau lajang, dan setelah lewat usia tersebut atau sudah menikah bisa masuk sebagai jamaah Muslimat NU.

Bapak Sartiman salah seorang suami yang istrinya berwirausaha berpendapat bahwa berkenaan dengan penghasilan dalam keluarga lebih besar istrinya. Namun beliau tidak pernah mempunyai rasa iri terhadap penghasilan istrinya, karena menurut beliau dalam berumah tangga ialah saling membantu dan dari awal juga dia mengizinkan istrinya berwirausaha, selama tugas dan peran istri sudah terlaksana pasti suami mendukung sepenuhnya.

Ibu Marfuah selaku sekretaris Muslimat NU juga menjelaskan bahwa dalam Muslimat NU terdapat bidang antar lintas agama. Maka dalam hal berbagi tidak hanya dengan yang beragama Islam saja, tetapi juga kepada non muslim. Contohnya saat terjadi bencana alam waktu itu di Sumbawa,

Donggala Muslimat NU menggalang dana bantuan seikhlasnya. Berhubung Muslimat NU adalah organisasi sosial, maka banyak kegiatan seperti penggalangan dana, dan Muslimat NU juga sudah asosiasi ke Palestina bergabung bersama GOP, Gabungan-22 organisasi berasal dari berbagai agama.

- **Pendapat Perempuan Mengenai Perspektif Islam**

Ibu Nurul salah satu pelaku usaha dan jamaah dari Muslimat NU mengungkapkan bahwa Islam mengajarkan tentang peran perempuan yang didukung untuk berwirausaha, tidak ada larangan.

Ibu Binti Khoiriyah yang juga salah satu pelaku usaha dan jamaah dari Muslimat NU berkata bahwa suami-suami dan keluarga juga merestui dengan memberikan izin. Dalam Islam bahwa sangat penting izin suami jika istri ingin keluar rumah dan dalam pengambilan keputusan.

Ibu Asmawati yang juga salah satu pelaku usaha dan jamaah dari Muslimat NU menambahkan bahwa selama perempuan sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga yaitu keluarganya, maka tentu suami-suami mereka memaklumi dan mengizinkan karena kegiatan yang dijalani juga jelas, seperti mengikuti pengajian atau ta'lim rutin, atau pelatihan-pelatihan keterampilan.

Ibu Marfuah selaku sekretaris Muslimat NU, menerangkan bahwa mengenai perspektif Islam ini sebenarnya adalah gambaran umum. Kalau di NU tentang kesetaraan gender itu sudah masuk ke pendidikan dalam artian sosialisasi dan pembelajaran, jadi tidak pernah ada yang namanya perempuan merasa terkekang dari pihak suami kalo istri itu beraktifitas diluar dalam kegiatan organisasi maupun dalam menambah pendapatan keluarga.

Beliau juga menambahkan bahwa ia merupakan salah satu contohnya. Beliau merupakan seorang penjahit rumahan dan kegiatan lainnya di pasar, dengan berjualan sembako dan lainnya. Hal yang demikian erat juga hubungannya dengan keinginan dalam karakter perempuan yang mandiri. Hal tersebut juga sesuai dengan pandangan Muslimat NU dari tahun 2016 sampai 2021 yang menginginkan muslimat yang mandiri dan religius. Dalam artian, semua tidak ketergantungan dengan suami, namun masih mengikuti peraturan Islam.

Ibu Muhliana selaku Ketua PC 1 Muslimat NU juga menambahkan bahwa dalam Muslimat NU perempuan sangat dimuliakan, wanita harus menjadi istri sholehah, ibu yang baik sehingga membuat anaknya sholeh dan sholehah, menjadi orang yang kuat, mandiri, tidak ketergantungan suami, harus bisa berorganisasi, serta menjaga harkat dan martabat perempuan.

- **Pendapat Masyarakat (Laki-laki dan Perempuan), Perlu Atau Tidak Perempuan Terlibat dalam Pembangunan (Akses, Partisipasi, Kontrol)**

Ibu Margayani selaku Kepala Bidang Ekonomi Perempuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu mengungkapkan bahwa perempuan-perempuan yang berwirausaha tersebut mayoritas hanyalah sebagai pekerja, pemimpin kelompok usahanya yang laki-laki. Maka terkait akses pengambilan keputusan atau turut andil dalam partisipasi politik belum ada. Beliau juga berkata bahwa perempuan-perempuan tersebut beranggapan karena sudah merasa cukup dan nyaman dengan situasi dan kondisi yang mereka rasakan sekarang.

Kemudian Ibu Sulistyoningih sebagai Kepala Bidang Perindustrian dari Klinik IKM Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu juga menyatakan bahwa mayoritas perempuan yang berwirausaha di Kabupaten Pringsewu ini hanya sebagai pekerja lepas dan secara informal, sehingga tidak terdata untuk wajib pajak.

- **Pemberdayaan Perempuan**

Ibu Margayani selaku Kepala Bidang Ekonomi Perempuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu mengungkapkan bahwa salah satu kelompok usaha yang maju ialah produksi kain perca. Produksi

kain perca ini berawal di tahun 2011an, dimana baru kelompok usaha kecil, yang dieplopori oleh seseorang yang bernama Pak Herman yang tadinya bekerja di pabrik tekstil di tanggerang, dimana limbah industri nya di bawa pulang ke daerah sini kemudian diolah menjadi beberapa olahan keterampilan lainnya, seperti kesset, karpet, dan sebagainya. Kemudian beliau memberdayakan desanya, dan para pekerjapun bertambah.

Ibu Margayani juga menambahkan bahwa dari kelompok usaha kecil tersebut, pemerintah membantu dengan beberapa program terkait dari berbagai sektor seperti Dinas PPPA dan Koperindag juga kerap kali mengirim beberapa pekerja untuk melakukan *study banding* ke luar daerah, dengan tujuan mendapatkan referensi tentang olahan produksi yang bisa dikembangkan di adaerah asal, serta memberikan motivasi. Kemudian, setiap tahunnya juga ada bantuan hibah berupa peralatan yang total nilainya sebesar Rp 10.000.000,- yang diberikan kepada kelompok-kelompok usaha yang masih kecil.

Ibu Sulistyو Ningsih sebagai Kepala Bidang Perindustrian dari Klinik IKM Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu juga menyatakan bahwa dari Dinas Koperindag ada yang namanya program pengiriman pekerja untuk belajar. Pada tahun 2015/2016 Dinas Koperindag mengirim beberapa pekerja dari kelompok usaha batik tulis dari Kabupaten Pringsewu ke Yogyakarta, dan kebetulan Dinas Koperindag bekerjasama dengan Balai Kerajinan dan Batik

Yogyakarta, yang kemudian diadakan pelatihan selama seminggu. Saat ini kelompok tersebut berkembang di Desa Jatiagung, Kecamatan Ambarawa.

Kemudian, Bidang Perindustrian juga memberikan bantuan berupa peralatan dan bimbingan atau pelatihan, sebagai contoh bantuan *sealer*, bimbingan pengemasan dan pemasaran ke retail besar (indomaret). Biasanya IKM yang telah berada dalam pembinaan dinas minimal dua tahun, dan ketika kelompok usaha sudah memenuhi syarat dan ketentuan kedinasan menghimbau untuk pengajuan proposal dalam pengadaan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi, seperti tahun ini yang menerima kebanyakan dari Kelompok Wanita Tani.

Ibu Sulistyio Ningsih juga menambahkan bahwa terkait perizinan atau PIRT ialah melalui Dinas Kesehatan dan PTSP yang mengeluarkan. Maka Dinas Koperindag memberikan Pelatihan Keamanan Pangan, dan setelahnya ada sertifikat PKP, dimana PKP harus dipenuhi sebagai syarat dan ketentuan untuk nomor PIRT. Kemudian, ada juga program pemberian sertifikasi halal gratis dan sosialisasi izin usaha industri.

Ibu Margayani menjelaskan bahwa kelompok usaha yang sudah besar merupakan wajib pajak, dan data-data yang sudah menerima bantuan dari Dinas PPPA masuk ke dalam formulir e-catalog.

Gambar 7. Formulir E-Catalog Usaha Mikro

Nama Pelaku Usaha (Sesuai KTP)	NIK	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Alamat	Provinsi	Nomor Hp	Mikro/Industri rumahan yang anda kelola merupakan binaan	Nama Usaha (Merk dagang)	Lama Usaha
									<2 th, 2th, >2th
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Suprihatin, A.Md	18100862112760000	22-12-1976	Perempuan	Sukoharjo I	Lampung	085381005929	Keripik & klinting	Fatan Mandiri	>2 th
Siti Markamah	1810075011670002	10-11-1967	Perempuan	Bandung Baru	Lampung	085366935328	Keset Karakter	Keset Karakter	>2 th
Asminah	1810016204800003	22-04-1982	Perempuan	Pajaresuk	Lampung	081373405546	Roti, Kue Kacang	Mahkota	>2 th
Sugiyani	1810044506740004	05-06-1974	Perempuan	Sidodadi	Lampung	082371995914	Kopi Bubuk Robusta	Prima Coffe	>2 th
Halimah Hidayat	1810055010660012	10-10-1966	Perempuan	Gumuk Mas	Lampung	081283920498	Tapis & Sulam Usus	Sekar Mandiri	>2 th

*Sumber: Observasi Hasil Penelitian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pringsewu, 2021*

Ibu Margayani juga menjelaskan bahwa pemerintah setelah memberikan bantuan, tetap memantau dan memonitoring, membantu penyaluran produk dan kemasan. Produk-produk kelompok usaha tersebut juga dipasarkan di event-event tertentu seperti Lampung Fair, Inakraf, ataupun beberapa perayaan hari jadi organisasi-organisasi besar seperti salah satunya Muslimat NU.

Sejalan dengan pendapat di atas, Ibu Asmawati salah satu pelaku usaha dan jamaah muslimat NU mengungkapkan bahwa kegiatan Muslimat NU setiap

minggunya ada pelatihan keterampilan dan instansi terkait memberikan pendampingan gratis. Kemudian hasil produk juga dipasarkan di lomba-lomba kreasi kuliner dan perayaan hari jadi Muslimat NU.

Gambar 8. Pemasaran Hasil Produk





Sumber: Dokumentasi Hasil Penelitian dari MUSLIMAT NU, 2021

Kemudian, Ibu Nurul yang juga salah satu pelaku usaha dan jamaah Muslimat NU menambahkan bahwa pada tahun 1985an, beliau di kirim ke Jakarta sebagai wakil dari Lampung untuk mengikuti pelatihan terkait industri dan pangan seperti tentang perizinan dan pemasaran.

Ibu Margayani menjelaskan mengenai alasan kelompok usaha yang berkembang ialah karena niat dari kelompok usaha tersebut yang memang

aktif untuk berwirausaha. Kemudian didukung juga dengan dana desa, dimana kelompok usaha dianggarkan melalui pemberdayaan perempuan.

Lalu berkenaan dengan lembaga yang mendampingi perempuan atau mitra aktif yaitu yang tergabung ke dalam PUSPA, dimana terdapat pelaku usaha, pemerintah, kesehatan dan perguruan tinggi.

Ibu Muhliana selaku Ketua PC 1 Muslimat NU menjelaskan bahwa sejak akhir Januari sampai akhir Maret 2021, 9 kecamatan sudah membuat pelatihan LKM dan *home industry*. LKM (Latihan Kembangmitra Manajemen) merupakan sebuah pelatihan yang mengajarkan mengenai cara berorganisasi yang benar dalam islam, dimana intisarinnya adalah tidak hanya sekedar mengumpul mengaji lalu selesai pulang, tapi banyak ilmu yang bisa diambil dari hal tersebut. Kegiatan tersebut tanpa ada anggaran, karena tujuannya untuk umat dan tabungan akhir.

Beliau juga menambahkan bahwa dengan melakukan *home industry* yang diisi oleh *chef* dari Bandar Lampung yang diadakan dari Dinas Pariwisata di Hotel Swiss Bell selama satu hari pelatihan tentang kewirausahaan adalah untuk meningkatkan kinerja. Hasil dari pelatihan tersebut membantu pembuatan kue kering dan kue basah sehingga pengerjaan dalam satu hari bisa 5 sampai 6 jenis makanan. Keterampilan tersebut juga diperlombakan, dan karena acara tersebut juga menjadi ajang promosi ke pemerintah daerah setempat, sehingga banyak sekali pemesan kue di Muslimat.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Ibu Marfuah selaku sekretaris Muslimat NU juga menambahkan bahwa tujuan membuat pelatihan terutama untuk keluarga dulu. Selanjutnya digabung dengan komunitas khusus industri kue, yang kemudian rekan-rekan yang mendapat pelatihan tersebut membantu dan melatih rekan-rekan lainnya agar semua mempunyai keterampilan.

- **Potensi Ekonomi Sekitar**

Menurut Ibu Margayani selaku Kepala Bidang Ekonomi Perempuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu mengungkapkan bahwa pelatihan-pelatihan keterampilan yang diberikan juga dilihat dari potensi sumber daya alam yang memadai dari daerah tersebut.

Ibu Marfuah selaku sekretaris Muslimat NU menjelaskan bahwa dalam organisasi Muslimat NU yang anggota atau jamaahnya puluhan ribu orang, terdapat lembaga amal zakat infak dan sedekah NU (LAZISNU). Lembaga tersebut menaungi *ambulance* dan pengobatan gratis, dimana syaratnya hanya membawa kartu LAZISNU, dan anggarannyapun hanya seikhlasnya setiap bulan. Selain itu, terdapat juga koin surga. Kegiatan tersebut untuk pembagian sedekah ke kaum *dhuafa*, *lansia* dan yatim piatu. Pendataan di mulai dari kecamatan dan kelurahan, yang kemudian pembagiannya dikoodinir dari pihak kecamatan. Kemudian, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sumbangan dana yang mana rencananya akan diadakan

kegiatan Bina Latihan Kerja, dimana pembinaannya berfokus pada tata boga. Kegaitan-kegaitan tersebut merupakan gambaran dari program-program Muslimat NU dalam mendukung aktivitas ekonomi.

Ibu Siti Maisyaroh, salah satu pengrajin tapis di Desa Lugusari menjelaskan bahwa pada Tahun 80-an kepala desa berinovasi dan mengadakan pelatihan tentang tapis, dimana guru yang mengajarkan langsung dari Krui. Berdasarkan cara pembuatannya, pemilihan benang, metode, dan motifnya mempunyai kekhasan yang menarik, sehingga Tapis Krui terkenal mahal. Namun, daerah Pringsewu terkenal dengan pengerjaan tapis yang paling rapih.

Beliau juga menyebutkan bahwa pengrajin tapis yang aktif sekarang ada 80 orang. Usaha tapis ini telah beliau mulai dari tahun 1994. Awal usaha ini yaitu menjadi buruh dari talang padang, kemudian terfikir untuk usaha dengan modal sendiri, sehingga sekarang sudah banyak pengrajin dan beliau yang menjadi pengepungnya. Usaha ini di jual melalui online mulai dari 6 tahun yang lalu dan dibantu oleh IWAPI Provinsi, dimana terdapat 7 marketplace tempat beliau berjualan.

Kemudian, proses pembuatan *peci* memakai model pubian, karena jika memakai model krui pemasarannya susah karena bahannya mahal. Lalu beliau juga pernah membuka pelatihan di daerah Pesawaran sebelum puasa,

di dekat laut untuk melayani konsumen kurang mampu dan sampai sekarang masih berjalan. Beliau mempunyai agen yang mengantar ke tempatnya, sehingga beliau tidak perlu untuk menghabiskan waktu di perjalanan, karena beliau juga mengurus desain dan observasi ke pasar untuk mencari inspirasi paduan motif pada tapis. Wirausaha beliau juga merupakan salah satu dampingan dari dinas, sehingga sudah terdaftar dan terkena pajak. Beliau juga termasuk salah satu peserta seleksi yang lolos dalam 5 pengrajin tapis mewakili provinsi.

- **Persepsi Perempuan tentang Dirinya Sendiri**

Ibu Nurul sebagai salah satu pelaku usaha dan jamaah Muslimat NU mengungkapkan bahwa perempuan yang membantu perekonomian keluarga sangatlah berperan dalam kehidupan berumah tangga.

Ibu Binti Khoiriyah yang juga pelaku usaha dan jamaah Muslimat NU menambahkan bahwa perempuan merupakan sosok yang hebat, karena bisa membagi waktu antara perannya dalam keluarga dan perannya untuk berwirausaha.

Ibu Muhliana selaku Ketua PC 1 Muslimat NU berpendapat bahwa perempuan di Pringsewu ini umumnya sudah mandiri. Bahkan yang mempunyai toko hampir semua perempuan. Kemudian, zaman sekarang juga banyak menteri-menteri dan tokoh-tokoh penting negara merupakan

perempuan, sehingga menjadi tolak ukur akan berharganya seorang perempuan.

Ibu Marfuah selaku sekretaris Muslimat NU juga berpendapat bahwa sejalan dengan nilai yang ada pada Muslimat NU yang mengharuskan mandiri dan religius. Maka perempuan mandiri itu wajib, terutama dalam hal penghasilan. Pernah beliau bertanya kepada anaknya tentang malu atau tidak anaknya mempunyai seorang ibu yang berwirausaha sebagai penjahit, yang kemudian anaknya menjawab dengan tegas bahwa anaknya bangga mempunyai ibu yang berwirausaha sebagai penjahit sehingga bisa menguliahkan anaknya ke luar daerah. Maka dari itu, pendapat tersebut dijadikan motivasi beliau dalam memandang urgensi perempuan.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang terdapat pada hasil penelitian, maka tahap selanjutnya melakukan analisis mengenai kajian ini. Sulistiyani (2004), menyebutkan bahwa pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Tahap-tahap dalam pemberdayaan yaitu pertama tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, yang dimaksudkan ialah perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam penelitian ini, tahap penyadaran bermula dari lingkup internal yaitu sebuah kebiasaan untuk berbagi (*sodaqoh* atau sedekah).

1. Kondisi Internal

a) *Pandangan Islam pada Peran Perempuan*

Islam merupakan agama yang universal, tidak hanya mengatur masalah ekonomi, sosial budaya, perdagangan dan lainnya, tetapi juga mengatur masalah manusia dunia dan akhirat. Islam tidak melarang penganutnya untuk bekerja, asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam Islam, bekerja merupakan sesuatu hal yang sangat dianjurkan. Apalagi jika bekerja dengan seorang mukmin tidak hanya dapat menghindarkan dirinya dari meminta-minta, tetapi juga dapat menafkahi orang tuanya yang sudah renta dan anak-anaknya yang masih kecil. Beberapa anjuran mengenai bekerja terdapat dalam Surat Al-Mulk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا

مِنْ رِزْقِهِ ^ط وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu(kembali setelah) dibangkitkan.

Sementara itu tentang pandangan Islam mengenai perempuan yang bekerja, terdapat dalam surat Al-Qashash ayat 23, dimana ayat tersebut menyebutkan bahwa selama perempuan bisa menjaga kehormatannya

maka dia bisa bekerja di ruang publik. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa dalam berkegiatan ekonomi maka diperbolehkan kaum laki-laki dan perempuan untuk saling berbicara dan memandang (Qomar: 2019).

Dari ayat tersebut jelas bahwa Islam membenarkan keterlibatan perempuan dalam pekerjaan, perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri ataupun bersama orang lain, dengan lembaga keuangan maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya, selama mereka membutuhkan pekerjaan dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Pekerjaan dan aktifitas yang dilakukan oleh perempuan di masa Nabi cukup beraneka ragam, dan agar hal tersebut dapat berjalan beriringan, maka perempuan dapat menentukan manakah dari sekian banyak kemaslahatan yang lebih penting dan harus dipecahkan pertama kali, misalnya dengan skala prioritas. Skala prioritas sebagaimana dijelaskan pada sosiologi menunjukkan bahwa penunaian tugas oleh perempuan atas

tanggung jawab mengurus suami dan membahagiakan serta mendidik anak-anak agar menjadi anak soleh merupakan tingkat kemaslahatan yang paling tinggi atau merupakan tuntutan skala prioritas primer dalam konsep kemaslahatan masyarakat.

Dihadapkan dari realita ini jika dalam suatu kondisi perempuan dihadapkan kepada tugas dan kewajiban dan rumah tangga serta aktivitas keilmuan dan sosial lainnya, padahal dia tidak sanggup menunaikan keduanya dalam waktu bersamaan, maka yang harus dikerjakan berdasarkan retorika skala prioritas adalah menunaikan tugas dan kewajiban rumah tangga maka hal itu harus mengorbankan kepentingan lainnya. Hal ini lebih jelas lagi ketika perempuan bekerja hanya untuk mengejar status sosial atau hanya demi kebanggaan terhadap masyarakat. Dalam kondisi semacam ini, perempuan harus mendahulukan kehidupan, seperti merawat dan mendidik anak-anaknya.

Allah memberikan berbagai macam kekayaan alam dan muka bumi, hingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan makan, minum dan lain-lainya. Segala bahan yang Allah telah sediakan dimuka bumi ini dengan mudah dapat diraih asalkan mau bekerja dengan keras. Jadi orang mukmin tidak boleh berpangku tangan menghadapi kehidupan. Ayat diatas dengan tegas memerintahkan kepada manusia untuk bekerja keras agar mereka dapat hidup makmur. Perintah

mengelola bumi untuk kemakmuran menunjukkan bahwa manusia wajib bekerja keras agar mendapatkan rezeki dari Allah SWT.

Pada dasarnya ajaran Islam sangat mendorong kepada kaum perempuan untuk bekerja keras bekerja secara optimal dan maksimal sesuai dengan kemampuan dan kodratnya. Karena itulah, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan pria dan perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk menyatakan pendapat dan aspirasinya. Bahkan sebagian dari mereka ada yang ikut berperang, mendukung tugas pria. Perempuan yang bekerja di luar rumah harus bisa menginvestasikan waktunya secara sempurna dan menjadi komponen produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, perempuan yang bekerja tidak boleh sampai menelantarkan perealisasi tanggung jawab pokok dan paling utama bagi perempuan muslimah.

Senada dengan hal tersebut, terdapat juga data wawancara yang menjelaskan bahwa suami ataupun keluarga mendukung wirausaha pasangannya dengan membantu mencari bahan mentah atau lainnya karena usaha tersebut juga membantu untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, tetapi dengan syarat bahwa urusan rumah tangga harus sudah terselesaikan lebih dahulu. Walaupun ada yang mensubstitusikan tugas rumah tangga seperti memasak kepada asisten rumah tangga, namun tetap saja tanggung jawab akhir berada pada seorang ibu yang

memastikan bahwa tugas tersebut sudah diselesaikan. Hal yang demikian menunjukkan bahwa perempuan yang berwirausaha ialah sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah tambahan mempunyai beban ganda.

b) Organisasi Perempuan Islam

Penelitian ini mencoba untuk melihat kegiatan ekonomi perempuan islam dalam lingkup organisasi. Adapun lingkup organisasi yang dijadikan objek penelitian adalah Muslimat NU di Kabupaten Pringsewu.

Muslimat NU adalah salah satu badan otonom dari Jam'iyah Nadhlatul Ulama' (NU), dimana anggota Muslimat NU merupakan perempuan NU. Organisasi ini lahir pada 29 Maret 1946. Tampilnya perempuan di organisasi NU sudah terlihat ketika Muktamar Ke-13 di Menes, Banten pada tahun 1938. Bahkan, di muktamar berikutnya, di Magelang pada tahun 1939, perempuan NU sudah dipersilakan untuk memimpin jalannya sidang.

Muktamar NU ke-13 di Menes, Banten, 1938 menjadi momen awal gagasan mendirikan organisasi perempuan NU itu muncul. Dua tokoh, yakni Ny R Djuaesih dan Ny Siti Sarah tampil sebagai pembicara di

forum tersebut mewakili jamaah perempuan. Ny R Djuaesih secara tegas dan lantang menyampaikan urgensi kebangkitan perempuan dalam kanchah organisasi sebagaimana kaum laki-laki. Ia menjadi perempuan pertama yang naik mimbar dalam forum resmi organisasi NU. Secara internal, di NU ketika itu juga belum tersedia ruang yang luas bagi jamaah perempuan untuk bersuara dan berpartisipasi dalam penentuan kebijakan. Ide itu pun disambut dengan perdebatan sengit di kalangan peserta Mukhtamar. Setahun kemudian, tepatnya pada Mukhtamar NU ke-14 di Magelang, saat Ny Djuaesih mendapat tugas memimpin rapat khusus wanita oleh RH Muchtar (utusan NU Banyumas) yang waktu itu dihadiri perwakilan dari daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat, seperti Muntilan, Sukoharjo, Kroya, Wonosobo, Surakarta, Magelang, Parakan, Purworejo, dan Bandung. Forum menghasilkan rumusan pentingnya peranan wanita NU dalam organisasi NU, masyarakat, pendidikan, dan dakwah.

Akhirnya pada tanggal 29 Maret 1946, bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1365 H, keinginan jamaah wanita NU untuk berorganisasi diterima secara bulat oleh para utusan Mukhtamar NU ke-16 di Purwokerto. Hasilnya, dibentuklah lembaga organik bidang wanita dengan nama Nahdlatol Oelama Moeslimat (NOM) yang kelak lebih populer disebut Muslimat NU. Hari inilah yang di kemudian hari diperingati sebagai hari lahir Muslimat NU sampai sekarang. Pendirian lembaga ini dinilai

relevan dengan kebutuhan sejarah. Pandangan ini hanya dimiliki sebagian kecil ulama NU, di antaranya KH Muhammad Dahlan, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH Saifuddin Zuhri.

Atas dasar prestasi dan kiprahnya yang demikian, Mukhtamar NU ke-19 di Palembang pada tahun 1952, Muslimat NU memperoleh hak otonomi. Mukhtamirin sepakat memberikan keleluasaan bagi Muslimat NU dalam mengatur rumah tangganya sendiri serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya di medan pengabdian. Sejak menjadi badan otonom NU, Muslimat lebih bebas bergerak dalam memperjuangkan hak-hak wanita dan cita-cita nasional secara mandiri. Dalam perjalanannya, Muslimat NU bergabung bersama elemen perjuangan wanita lainnya, utamanya yang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia (Kowani), sebuah federasi organisasi wanita tingkat nasional. Di Kowani, Muslimat NU menduduki posisi penting.

- Visi Muslimat NU :

Terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam Ahlusunnah wal jamaah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridloi Allah SWT.

- Misi Muslimat NU :

- 1) Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang sadar beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - 2) Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang berkualitas, mandiri dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 - 3) Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.
 - 4) Melaksanakan tujuan Jam'iyah NU sehingga terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata dan diridhoi Allah SWT.
- Strategi Muslimat NU :
Untuk mencapai visi dan misi yang dimaksud, Muslimat NU menentukan strategi sebagai berikut:
 - 1) Mempersatukan gerak kaum Perempuan Indonesia, khususnya Perempuan Islam Ahlussunah Wal Jama'ah.
 - 2) Meningkatkan kualitas Perempuan Indonesia yang cerdas, trampil, dan kompetitif, sebagai bentuk tanggungjawab terhadap Agama, Bangsa, Negara dan membentuk generasi penerus bangsa yang taat beragama.
 - 3) Bergerak aktif dalam kegiatan pelayanan masyarakat di bidang:
 - a. Peribadatan, dakwah, dan penerangan
 - b. Sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup.
 - c. Pendidikan

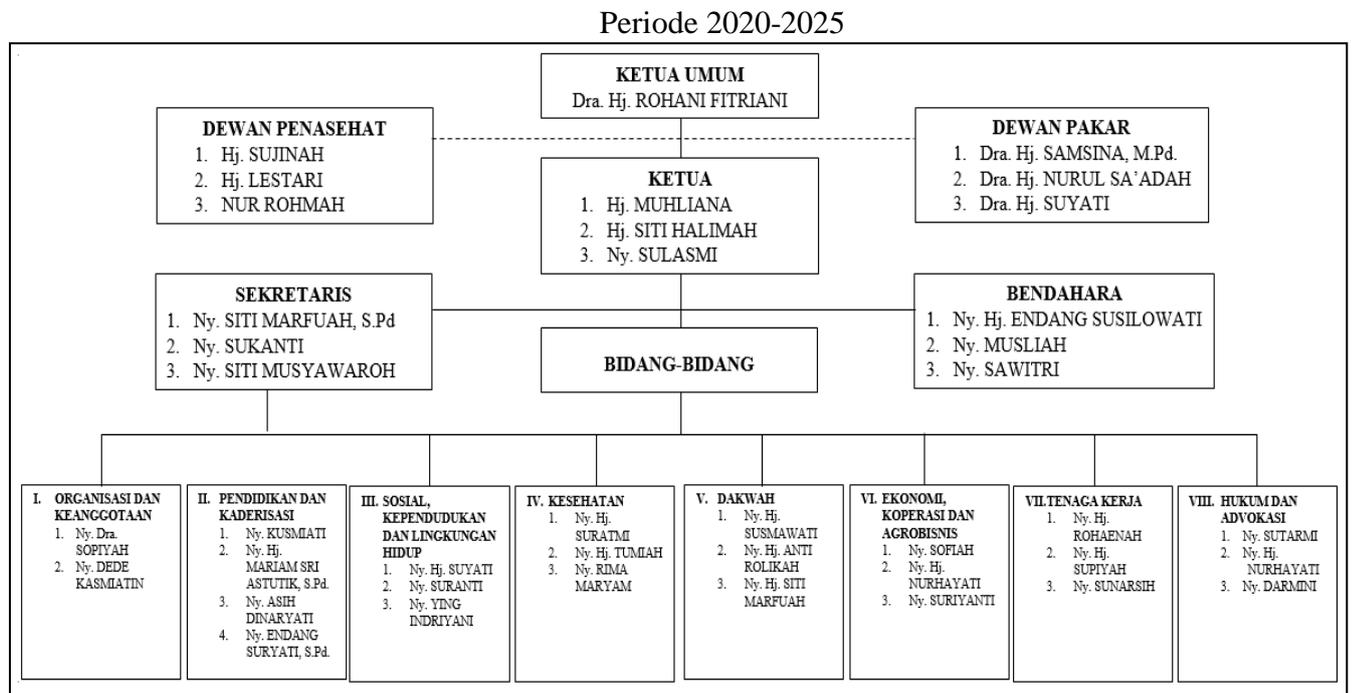
- d. Hukum dan Advokasi
 - e. Usaha Kemasyarakatan lainnya yang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.
- 4) Meningkatkan jejaring dan kerjasama dengan badan-badan Lembaga/organisasi lain yang tidak bertentangan dengan visi dan misi organisasi.

Dari penjelasan yang tertuang di dalam visi dan misi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Muslimat NU sangat mendorong perempuan muslim untuk memahami kewajibannya di dalam masyarakat dan lalu mengambil bagian untuk ikut serta mewujudkan keadaan yang adil dan makmur dalam masyarakat tersebut.

Sementara itu, Muslimat NU di Kabupaten Pringsewu menurunkan visi-misi tersebut ke beberapa program-program kerja yang sesuai dengan bidang-bidang yang terdapat pada struktur organisasi Muslimat NU Kabupaten Pringsewu, yaitu sebagai berikut:

- **Struktur Organisasi Muslimat NU Kabupaten Pringsewu**

Gambar 9. Struktur Organisasi Muslimat NU Kabupaten Pringsewu



Sumber: Observasi Penelitian, 2021

- **Program Kerja Muslimat NU Kabupaten Pringsewu**

- 1) **Bidang Organisasi dan Keanggotaan**

- Menerbitkan Kartamus NU
- Penguatan ideologi ASWAJA
- Mengfungsikan pengurus PC sesuai dengan bidangnya.
- Melaksanakan konferensi tepat waktu
- Memperingati HARLAH Muslimat NU
- Memperingati PHBI

- Mengintensifkan Kordinasi dan Konsolidasi baik internal Muslimat maupun eksternal (Badan Otonom NU)
- Mengadakan LKM Muslimat NU Lanjutan
- Menyelenggarakan, dan melaksanakan dan mengikuti seminar-seminar.
- Membuat SK Pengurus Anak Ranting
- Mendata Majelis Ta'lim
- Mengintensipkan penarikan uang bakti setiap 3 bulan sekali.

2) Bidang Pendidikan dan Pengkaderan

- Mengadakan Pelatihan Da'iyah
- Mengadakan Pelatihan Home Industri dan pertanian.
- Membudayakan budaya Home Reading bagi warga Muslimat NU
- Mengadakan pelatihan tentang Pemasaran Produk Home Industri
- Mengadakan Pembinaan terhadap PAUD, RAUDHATUL ATHFAL, TPA, TPQ dan taman pendidikan lainnya.
- Turba dan Pembinaan ke PAC minimal 6 bulan sekali.

- Mengadakan Seminar tentang Pendidikan, dan Kesehatan (Bahaya narkoba, kanker serviks dan pergaulan bebas)

3) Bidang Sosial, Kependudukan, dan Lingkungan Hidup

- Menyantuni anak yatim, Lansia dan kaum Dhua'fa
- Menyelenggarakan Pelayanan KB gratis
- Mengadakan Sunatan massal gratis.
- Donor Darah
- Memanfaatkan lahan Pekarangan untuk tanaman obat keluarga dan sayuran.
- Pembiasaan kegiatan Jum'at bersih

4) Bidang Penerangan/Dakwah

- Mengikut sertakan Pengurus PC dan PAC pelatihan Daiyah.
- Membuat Panduan dakwah ala ahlussunnah wal Jama'ah.
- Mengadakan Pelatihan Da'iyah
- Mengambil momen hari besar Islam untuk Pengajian akbar dan istighosah 6 bulan sekali
- Menyelenggarakan Tarbiyah Ahlussunnah Waljama'ah 1 bulan sekali bagi PC dan PAC.

- Mengadakan Simakan dan Tahtim Al-Qur'an khusus Pengurus PC
- Mmbudayakan membaca Al-Qur'an sehabis shalat minimal satu ruku' (satu 'ain)

5) Bidang Kesehatan

- Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan mengadakan Penyuluhan tentang bahaya kanker serviks, narkoba dan pergaulan bebas.
- Mengikutsertakan anggota muslimatNU untuk mensukseskan program Posyandu Balita, Posyandu lansia.dan PIN
- Membudayakan warga Muslimat NU untuk menjalankan program PHBS

6) Bidang Ekonomi, Koperasi, dan Agrobisnis

- Mengusahakan Pemasaran Produk olahan dari anggota Muslimat.
- Menghidupkan kembali Koperasi An-Nisa
- Membiasakan bermuamalah hanya dengan anggota Muslimat NU dan badan otonom NU.
- Menyelenggarakan pelatihan manajemen dalam bisnis.

7) Bidang Tenaga Kerja

- Menyalurkan tenaga kerja warga NU yang mau bekerja diluar negeri maupun di dalam negeri.
- Bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja mengadakan Penyuluhan tentang Bursa Tenaga Kerja dan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan.

8) Bidang Hukum dan Advokasi

- Bekerjasama dengan Kejati dan Kehakiman mengadakan penyuluhan tentang hukum yang berlaku di Indonesia
- Bekerjasama dengan Kepolisian mengadakan Penyuluhan tentang kemana dan bagaimana tata cara mealapor bila terjadi KDRT, Penyalahgunaan Narkoba, Tatib berlalu lintas dan Tabrak lari.
- Membantu Pembelaan Hukum terhadap anggota muslimat NU yang tersangkut kasus hukum.

Muslimat NU mempunyai 8 bidang dengan program-program yang disesuaikan dengan visi dan misi, salah satunya bidang ekonomi, koperasi dan agrobisnis yang dibentuk pada tahun 2019. Namun karena adanya *Pandemic Covid-19*, program-program tersebut tertunda sehingga untuk memberdayakan anggota Muslimat baru

dilaksanakan di awal tahun 2021, yang baru sebatas pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ekonomi masing-masing anggotanya.

- **Keuangan dan Kekayaan Muslimat NU**

Untuk membiayai kegiatan operasional nya, Muslimat NU memiliki beberapa sumber pendanaan, sebagai berikut :

1. **Uang Pangkal.**

Uang Pangkal adalah uang diberikan oleh calon anggota untuk memenuhi salah satu syarat agar diterima menjadi anggota besarnya adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dibayarkan satu kali saja. Uang pangkal seluruhnya menjadi hak Pimpinan Ranting.

2. **Uang iuran (T'arah Syahriyah)** adalah uang yang diberikan anggota kepada organisasi setiap bulan sebagai sumbangan bagi pembiayaan organisasi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Uang iuran bulanan dibagi sebagai berikut : 45 % untuk Ranting, 15 % untuk Anak Cabang, 15 % untuk Cabang, 10 % untuk Koordinator daerah, 10 % untuk Wilayah, 10% untuk Pimpipinan Pusat.

3. **Bantuan yang tidak mengikat.**

4. **Usaha lain yang halal.**

c) Potensi Ekonomi Komunal

Sedekah merupakan hal wajib dalam Agama Islam, karena dalam ajaran Agama Islam sedekah merupakan sebuah kebaikan untuk mencapai

surga, semakin rajin memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan maka semakin banyak pula amal kebaikan yang didapatkan. Hal yang demikian sesuai dengan basis keagamaan dalam organisasi Muslimat NU di Kabupaten Pringsewu. Muslimat NU adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial keagamaan, dimana anggota atau jamaah keseluruhannya adalah perempuan, dan di Muslimat NU Kabupaten Pringsewu para perempuan tersebut kerap kali melakukan kegiatan-kegiatan berupa *sodaqoh* kepada yang lainnya baik skala kecil maupun besar. Kegiatan bersedekah ini juga merupakan sebuah solidaritas yang ditunjukkan para jamaah terhadap sesama manusia.

Penerapan solidaritas yang dilakukan diantaranya yaitu Muslimat NU kerap kali melakukan sosialisasi untuk membantu orang-orang yang terkena bencana alam, seperti donasi untuk Palu, Donggala, Palestina, dan kaum *dhuafa* lainnya. Kemudian, ada juga lembaga yang menaungi *ambulance* dan pengobatan gratis, dimana syaratnya hanya membawa kartu keanggotaan, dan anggarannyapun hanya seikhlasnya setiap bulan, lembaga tersebut bernama LAZISNU (Lembaga amal zakat infak dan sedekah NU). Lalu terdapat juga koin surga, yang merupakan sebuah kegiatan untuk pembagian sedekah ke kaum *dhuafa*, *lansia* dan yatim piatu. Pendataan di mulai dari kecamatan dan kelurahan, yang kemudian pembagiannya dikoordinir dari pihak kecamatan.

Selain itu juga terdapat agenda-agenda berupa *ta'lim* atau pengajian rutin, selain diisi dengan ceramah dapat ditemukan pula beberapa jamaah yang mempunyai usaha seperti makanan ringan membawanya ke *ta'lim*, dan jamaah lainnya membantu dengan membeli produknya. Hal yang demikian menunjukkan bahwa Muslimat NU sebagai sarana organisasi juga menjadi sebuah *networking*.

d) Dukungan Pemerintah Daerah

Terdapat kerja sama dengan dinas-dinas terkait pembinaan berupa pengembangan *home industry* kepada jamaah yang mempunyai usaha-usaha tersebut untuk meningkatkan kapasitas diri. Hal tersebut dinamakan *enabling*, yaitu salah satu dimensi pemberdayaan yang diartikan sebagai terciptanya sebuah iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang berkesinambungan. Iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat, dimana dalam penelitian ini kebiasaan bersedekah yang merupakan nilai dalam ajaran Agama Islam menjadi dorongan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga dana untuk bersedekah didapati dari inisiatif pemasaran hasil produk usaha dalam taraf kecil oleh para perempuan tersebut, yang mana usaha itu berkembang menjadi sebuah tujuan baru agar mampu mandiri dan mempunyai pemahaman

tentang bisnis dan hal itu menjadi tahap selanjutnya dalam pemberdayaan yaitu tahap transformasi kemampuan.

Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga mengambil peran di dalam pembangunan. Tahap kedua ini berhubungan langsung dengan tahap terakhir dalam proses pemberdayaan, dimana tahap terakhir yaitu tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tahap-tahap tersebut berkaitan erat dengan langkah-langkah pembinaan yang dilakukan dalam pengembangan *home industry*. Pengembangan *home industry* ini dilakukan dengan beberapa kerjasama, seperti bidang agrobisnis ekonomi dan koperasi Muslimat NU yang bekerjasama dengan bidang ketenagakerjaan untuk pengembangan pemberdayaan ekonomi perempuan. Lalu, ada pula dinas-dinas terkait yang mengusulkan *study banding* ke daerah lain untuk mencari referensi pengembangan kelompok usaha. Hal-hal tersebut sama saja dengan membuat lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Kepala Bidang Perindustrian dari Klinik IKM Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu menjelaskan mengenai perempuan-perempuan di daerah Pringsewu mempunyai kreativitas, kemandirian, dan kebebasan dalam bekerja di sektor ekonomi, sehingga banyak sekali yang mempunyai industri-industri kecil. Pada beberapa kecamatan yang ada terdapat klaster-klaster kelompok usaha yang sudah dibagi oleh Dinas Koperindag, mulai dari kelompok usaha dengan klaster pemula, lalu kelompok usaha dengan klaster 5 tahun, kemudian ada kelompok usaha dengan klaster lebih dari 5 tahun.

Beberapa kelompok usaha tersebut diantaranya yang menghasilkan produk yaitu kerajinan manik-manik, kerajinan tapis dari Desa Lugusari Kecamatan Pagelaran Utara, kerajinan kain perca dari Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas, keripik pisang merk Panda Tirai, makanan ringan merk Rabbani dari Desa Mataram Baru, makanan ringan merk Raffin's, dan dodol merk Mandiri dari Desa Podorejo. IKM tarafnya masih di bawah UKM, karena IKM khusus pelaku industri atau produksi. Sementara UKM jangkauannya lebih luas mencakup industri dan usaha-usaha lainnya, tidak hanya pelaku industri.

Pemerintah daerah membantu dengan beberapa program terkait dari berbagai sektor seperti Dinas PPPA dan Koperindag juga kerap kali

mengirim beberapa pekerja untuk melakukan *study banding* ke luar daerah, dengan tujuan mendapatkan referensi tentang olahan produksi yang bisa dikembangkan di daerah asal, serta memberikan motivasi. Kemudian, setiap tahunnya juga ada bantuan hibah berupa peralatan yang total nilainya sebesar Rp 10.000.000,- yang diberikan kepada kelompok-kelompok usaha yang masih kecil.

Dinas Koperindag mempunyai program pengiriman pekerja untuk belajar. Pada tahun 2015/2016 Dinas Koperindag mengirim beberapa pekerja dari kelompok usaha batik tulis dari Kabupaten Pringsewu ke Yogyakarta, dimana Dinas Koperindag bekerjasama dengan Balai Kerajinan dan Batik Yogyakarta, yang kemudian diadakan pelatihan selama seminggu. Saat ini kelompok tersebut berkembang di Desa Jatiagung, Kecamatan Ambarawa.

Bidang Perindustrian juga memberikan bantuan berupa peralatan dan bimbingan atau pelatihan, sebagai contoh bantuan *sealer*, bimbingan pengemasan dan pemasaran ke retail besar seperti indomaret. Biasanya IKM yang telah berada dalam pembinaan dinas minimal dua tahun, dan ketika kelompok usaha sudah memenuhi syarat dan ketentuan kedinasan menghimbau untuk pengajuan proposal dalam pengadaan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi, seperti tahun ini yang menerima kebanyakan dari Kelompok Wanita Tani. Lalu, terkait perizinan atau PIRT

ialah melalui Dinas Kesehatan dan PTSP yang mengeluarkan. Maka Dinas Koperindag memberikan Pelatihan Keamanan Pangan, dan setelahnya ada sertifikat PKP, dimana PKP harus dipenuhi sebagai syarat dan ketentuan untuk nomor PIRT. Kemudian, ada juga program pemberian sertifikasi halal gratis dan sosialisasi izin usaha industri. Kelompok usaha yang sudah berkembang besar merupakan wajib pajak, dan data-data yang sudah menerima bantuan dari Dinas PPPA masuk ke dalam formulir *e-catalog*.

2. Tantangan Eksternal

Sebelum pandemi terkadang ada jadwal setiap minggu pagi dengan agenda “*ngeruput*”, dimana warga sekitar jalan-jalan pagi sambil bersilahturahmi. Kemudian ada juga agenda setiap jumat pagi yaitu Pasar Tani di kawasan pemerintah kabupaten dengan menjajakan produk-produk hasil kelompok usaha. Pemerintah tidak lepas tangan, setelah pemberian beberapa program bantuan untuk kelompok usahapun, harus tetap memantau dan memonitoring, membantu penyaluran produk dan kemasan. Produk-produk kelompok usaha tersebut juga dipasarkan di event-event tertentu seperti *Lampung Fair*, *Inakraf*, ataupun beberapa perayaan hari jadi organisasi-organisasi besar seperti salah satunya Muslimat NU.

3. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Muslimat NU juga mengadakan LKM (Latihan Kembangmitra Manajemen) pada akhir Januari sampai akhir Maret 2021 di 9 kecamatan untuk pelatihan LKM dan *home industry*. LKM (Latihan Kembangmitra Manajemen) sendiri merupakan sebuah pelatihan yang mengajarkan mengenai cara berorganisasi yang benar dalam islam, dimana intisarinnya adalah tidak hanya sekedar mengumpul mengaji lalu selesai pulang, tapi banyak ilmu yang bisa diambil dari hal tersebut. Kegiatan tersebut tanpa ada anggaran, karena tujuannya untuk umat dan tabungan akhir.

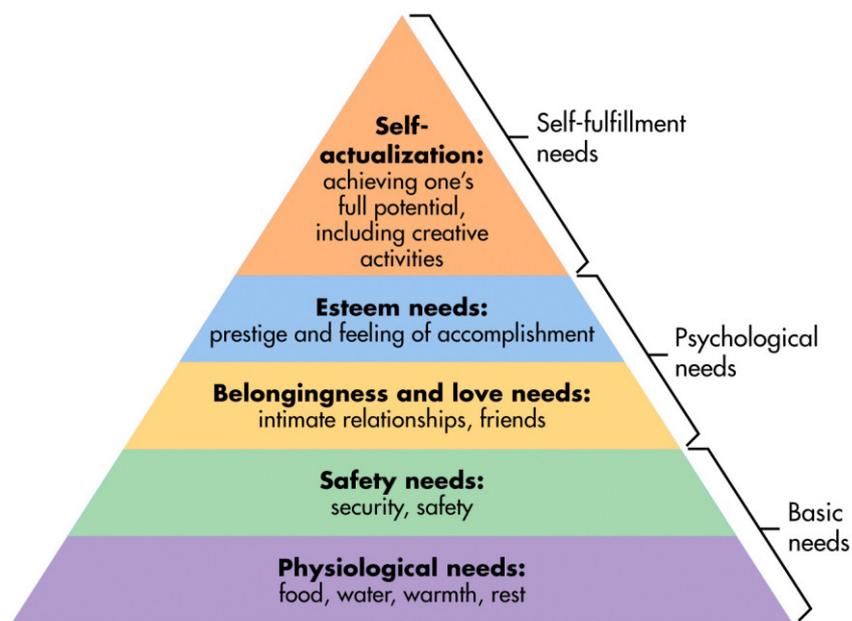
Pelatihan *Home industry* tersebut diisi oleh *chef* dari Bandar Lampung yang diadakan dari Dinas Pariwisata di Hotel Swiss Bell selama satu hari pelatihan tentang kewirausahaan adalah untuk meningkatkan kinerja. Hasil dari pelatihan tersebut membantu pembuatan kue kering dan kue basah sehingga pengerjaan dalam satu hari bisa 5 sampai 6 jenis makanan. Keterampilan tersebut juga diperlombakan, dan acara tersebut juga menjadi sarana promosi ke pemerintah daerah setempat, sehingga banyak sekali pemesan kue ke Muslimat NU. Selanjutnya digabung dengan komunitas khusus industri kue, yang kemudian rekan-rekan yang mendapat pelatihan tersebut membantu dan melatih rekan-rekan lainnya agar semua mempunyai keterampilan.

Penghasilan yang didapatkan dari pengembangan *home industry* yang ditujukan untuk bersedekah pada akhirnya juga menjadi sebuah penghasilan keluarga yang secara signifikan membantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal yang demikian dapat disebut sebagai *empowering*, dimana potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi dan pendekatan yang ditempuh adalah dengan cara meningkatkan skill dan kemampuan manajerial. Sementara itu, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait seperti yang telah disebutkan merupakan sebuah *maintaining*, dimana potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan sehat.

Home industry yang banyak dikembangkan oleh perempuan-perempuan mandiri tersebut menempatkan perempuan pada beban kerja yang *overload* atau biasa disebut beban ganda. Beban ganda (*double burden*) merupakan beban pekerjaan yang diterima salah satu pihak lebih banyak dibandingkan pihak lainnya, dimana upaya mensubstitusikan pekerjaan kepada orang lain, seperti asisten rumah tangga atau anggota keluarga lainnya, tetapi tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Berdasarkan hasil penelitian ini ditunjukkan dengan para perempuan yang berwirausaha untuk mencari nafkah tambahan, tetapi posisi para perempuan tersebut ialah seorang ibu rumah tangga.

Selanjutnya peneliti mencoba untuk melihat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Muslimat NU ini sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan manusia seperti yang disampaikan oleh Abraham Maslow (1943), yaitu terdapat lima kebutuhan yang manusia : (1) kebutuhan fisik, (2) kebutuhan keamanan, (3) kebutuhan memiliki dan cinta, (4) kebutuhan akan penghargaan/pengakuan, dan (5) kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi adalah kebutuhan manusia hierarki tertinggi.

Gambar 10. Hierarki kebutuhan Maslow



Sumber: McLeod, 2019

Keterlibatan perempuan dalam organisasi Muslimat NU dan berkegiatan dalam organisasi tersebut, mendorong perempuan untuk memenuhi kebutuhan memiliki dan cinta (memiliki teman dalam organisasi) dan juga mampu memenuhi kebutuhan untuk penghargaan/pengakuan dari lingkungan sekitar bahwa sebagai bagian dari masyarakat, para perempuan

tersebut diakui sebagai individu yang bisa melakukan hal-hal yang bersifat publik. Berorganisasi dalam Muslimat NU juga memenuhi kebutuhan individu yang berada di hirarki tertinggi yaitu aktualisasi diri, dalam hal ini beribadah (sedekah dan atau membantu orang lain) yang ditujukan untuk mendapatkan pahala (kebaikan).

Selanjutnya Astuti (2011) dalam artikel nya mengatakan bahwa motivasi adalah hal yang mendasari perilaku ekonomi seseorang. Motivasi itu sendiri didasari oleh pengetahuan dari individu tersebut. Sehingga bagi perempuan Islam, seyogyanya menjadikan pengetahuannya tentang tuntutan dalam ajaran Islam sebagai motivasi nya dalam kegiatan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh Syaefudin (1997) yang mengatakan bahwa tiap agama memiliki pandangan masing-masing tentang kajian ekonomi yang kemudian hal tersebut akan tercermin dalam perilaku ekonomi pengikut agama tersebut.

Salah satu asas dalam ekonomi islam adalah keadilan. Bahwa setiap individu harus diberi kesempatan untuk mendapatkan nafkah halal sesuai dengan kemampuannya. Apabila adat umat yang tidak mampu dikarenakan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam dirinya, maka menjadi kewajiban bagi umat yang lain untuk membantu nya Chapra dalam Astuti (2011). Hal ini kemudian juga menjadi motivasi para anggota Muslimat NU di Kabupaten Pringsewu untuk berlomba-lomba melakukan kegiatan ekonomi

secara aktif dalam rangka turut membantu umat yang lain yang membutuhkan. Perilaku ini sesuai dengan asas keadilan dalam perspektif ekonomi Islam.

a) Konsep *Calling* dalam Etika Protestan (Weber)

Konsep *calling* merujuk pada ide bahwa bentuk tertinggi dari kewajiban moral bagi individu adalah memenuhi tugasnya dalam urusan duniawi yang diproyeksikan dalam perilaku religius dalam aktivitas keduniaan sehari-hari (AS, 2006). Pandangan Calvinisme dianggap paling berpengaruh dalam merumuskan konsep *calling*. Pada doktrin ini, pandangan “*Hanya orang-orang terpilih yang bisa diselamatkan dari kutukan, dan pilihan itu telah ditetapkan jauh sebelumnya oleh Tuhan*” mendorong kaum Protestan untuk giat bekerja agar menjadi kaum terpilih.

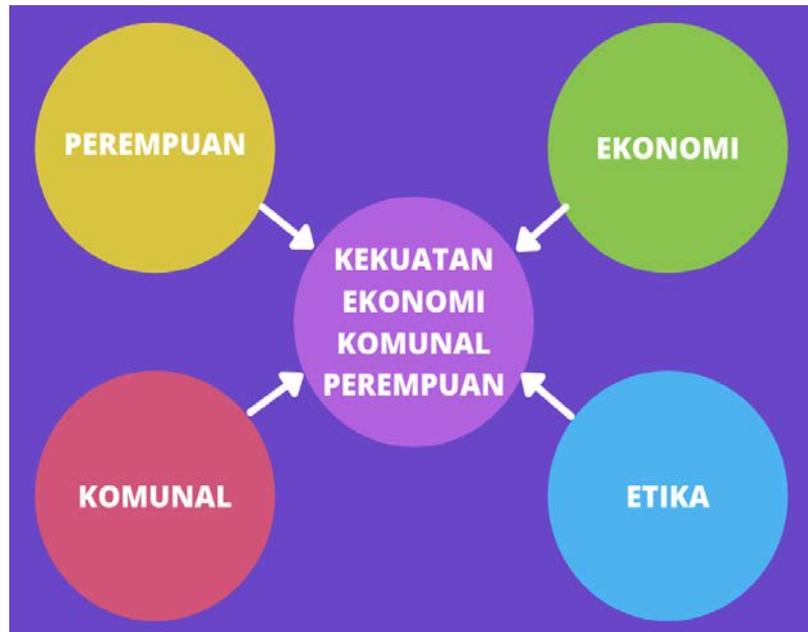
Hal tersebut juga merupakan nilai etika yang sama pada kelompok perempuan Islam (Muslimat NU) berkaitan dengan semangat untuk berkegiatan sehingga meningkatkan amal ibadah dan juga menjadi umat Islam yang taat. Kegiatan berwirausaha (ekonomi) sebagai upaya menjadi kaum terpilih.

b) Rancangan Skema Penguatan Ekonomi Perempuan Komunal

Dari penjelasan di atas tentang kebutuhan manusia untuk memiliki dan mencintai (teman), kebutuhan untuk penghargaan/pengakuan atas karya (hasil kerja) nya, serta kebutuhan untuk aktualisasi diri, maka fenomena tersebut berpotensi untuk menjadi sebuah kekuatan ekonomi komunal. Dimana di dalam ekonomi komunal ini ada rasa kebersamaan yang dapat menjadi awal untuk menuju keadilan ekonomi yang merata. Dalam penelitian ini yang menjadi masyarakat (umat) yang memenuhi kebutuhan-kebutuhannya seperti tersebut di atas adalah kaum perempuan Islam yang tergabung di dalam Muslimat NU Kabupaten Pringsewu.

Seperti yang telah dipaparkan dalam deskripsi data bahwa dalam setiap kegiatan bersama yang dilakukan oleh Muslimat NU, mereka selalu menyisihkan hartanya untuk sedekah bagi sesama anggota yang sedang membutuhkan. Kegiatan ini dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan kebaikan (pahala) dari Allah SWT. Kaum perempuan tersebut melakukan hal yang menjadi pengetahuan mereka sesuai dengan tuntutan ajaran agamanya. Mereka ingin menjadi orang yang terpilih (konsep *calling*). Jika hal tersebut terus didorong maka kekuatan ekonomi komunal perempuan untuk mengentaskan kemiskinan dapat tercapai. Di bawah ini adalah diagram yang menggambarkan faktor-faktor untuk mewujudkan ekonomi komunal tersebut.

Gambar 11. Ilustrasi Strategi Ekonomi Perempuan Islam



Sumber: Diolah Peneliti, 2021

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pemberdayaan perempuan miskin perdesaan dalam perspektif islam guna mewujudkan Lampung Berjaya (studi pada Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Pringsewu), maka kesimpulan dari kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Tidak terdapat hambatan yang signifikan untuk para perempuan dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari pemahaman ajaran Islam, keluarga, maupun masyarakat sekitar.
2. Secara budaya masyarakat, pandangan terkait tanggung jawab finansial berada pada laki-laki.
3. Aktivitas ekonomi yang dilakukan para perempuan saat ini masih berkontribusi pada sektor informal dan sebagai pemasukan tambahan, bukan pemasukan utama.
4. Muslimat NU sebagai organisasi lebih berperan sebagai wadah bagi para anggota yang berkegiatan ekonomi.
5. Pemerintah daerah telah melaksanakan beberapa program terkait kegiatan ekonomi perempuan, yang dinilai mampu untuk meningkatkan performa ekonomi di Kabupaten Pringsewu. Persyaratan usaha yang sudah berjalan dua tahun adalah indikator kemampuan dasar bisnis mencapai produktivitas.

6. Pemerintah daerah belum mendapatkan penjelasan mengenai Lampung Berjaya.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan terhadap kajian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi perempuan, diperlukan pembentukan organisasi atau kelompok bisnis beranggotakan perempuan. Bentuk organisasi yang disarankan adalah koperasi. Badan koperasi ini yang kemudian dapat bekerja sama dengan badan usaha lain atau swasta. Hal ini perlu dilakukan agar aktivitas ekonomi dapat tercatat dan juga dapat berkontribusi pada pendapatan daerah.
2. Peningkatan keterlibatan aktivitas ekonomi perempuan Kabupaten Pringsewu dapat diperkuat melalui program pemerintah daerah. Program pelatihan untuk mendukung produksi dengan standar dan kemampuan produksi yang stabil bagi kelompok usaha perempuan. Hal ini juga memberikan upaya pemberdayaan, peningkatan kapasitas ekonomi bagi perempuan dan keberlangsungan bisnis.
3. Dibutuhkan koordinasi program kerja antar satuan kerja pemerintah daerah, sehingga bisa mendorong munculnya *start-up* atau usaha bisnis baru sebagai upaya ungkit pada terbukanya lapangan kerja.
4. Penetapan tujuan dalam program Lampung Berjaya dalam peraturan daerah Kabupaten Pringsewu.

5. Pendampingan bagi Muslimat NU, dengan bersinergi dan mengambil peran dalam pelatihan-pelatihan maupun bantuan modal untuk mendukung program-program pada bidang ekonomi yang ada di organisasi tersebut. Hal ini sebagai bentuk apresiasi bagi upaya yang dilakukan organisasi Muslimat NU untuk menggerakkan ekonomi perempuan. Upaya tersebut dalam jangka panjang, jika didampingi dan dikelola dengan baik berpotensi menjadi jaringan ekonomi komunal yang nantinya dapat berkontribusi positif bagi pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Islam; Transformasi Sosial Berbasis Tauhid*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2018
- Agus Ahmad Syafi'i, *Manajemen Masyarakat Islam*, Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2001
- Ahmad Baidowi, *Gerakan Feminisme dalam Islam*, Jurnal Penelitian, Vol. X No 2, Mei-Agustus 2001
- Ajahari, *Pengembangan Masyarakat Islam; Anatomi, Proses, Tahapan dan Wilayah Pengembangannya*, Jakarta, 2001
- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004
- Anityas Dian Susanti, *Pola Partisipasi Warga dalam Pengembangan Desa Wisata Umbul Sidomukti Kabupaten Semarang*, Universitas Diponegoro: ISSN: 0853-2877, Vol.15 No.1 Januari-Juni 2015
- Arief Subhan, dkk. *Citra Perempuan dalam Islam, Pandangan Ormas Keagamaan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Armahedi Mahzar, *Islam Masa Depan*, Pustaka, 1993
- AS, M. (2006, Juni 17). *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*. Diambil kembali dari NU Online: <https://www.nu.or.id/post/read/8016/etika-protestan-dan-spirit-kapitalisme>
- Asep Syamsul M. Romli, *Komunikasi Dakwah, Pendekatan Praktis*, 2013, diakses dari www.romeltea.com
- Asytuti, R. (2011, April). *Rekonsepsi Ekonomi Islam dalam Perilaku dan Motivasi Ekonomi*. *Religia*, 14(1), 75-92.
- Aziz Muslim, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta : Samudra Biru, Cetakan I, November 2012
- Barbara Rogers, *The Domestication of Women: Discrimination in Developing Societies*, London and New York: Routledge, 1980
- Basuki, A. & Prasetyo, Y. E., *MeMusium-kan Kemiskinan*, Surakarta: PATTIRO Surakarta, 2007

Claros, Augusto Lopez dan Saadia Zahidi. 2005. *Woman Empowerment : Measuring The Global Gender Gap*. World Economic Forum. Diakses dari situs : www.weforum.org

Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1994

Creswell, J. W., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions*, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1998

Darwin, Muhadjir, *Memanusikan Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan*, Yogyakarta: Penerbit Benang Merah, 2005

DAWN, "Rethinking Social Development: DAWN's Vision," *World Development* 23, no.11, 1996

Dillon H.S dan Hermanto, *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*, Jakarta: LP3ES, 1993

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Bandung: Ptevika Aditam, 2005

Effendy, Onong Uhcjana. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002

Ester Boserup, *Woman's Role in Economic Development*, Great Britain: George Allen and Unwin, 1970

Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj. Tim LSPPA Yogyakarta: LSPPA, 1995

Fatima Mernissi, *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*, Penerj. Rahmani Astuti, Enna Hadi, Bandung : Mizan, 1994

Fauzie Nurdin, *Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Pengelolaan Resolusi Konflik*, Panta Rhei Books, Jogjakarta, 2016

Hadijah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994

<http://www.waspada.co.id/kemiskinan-jadi-masalah-terbesar-dunia>

<https://lampung.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjek>

<https://www.bps.go.id>

- Ibnu Sa'ad, *The Woman of Madina*, Penerj. Aisha Bewley, London: Taha Publishing Ltd, 1995
- Ife, Jim, *Community Development: Creating Community Alternatives: Vision, Analysis, and Practice*, Australia, Longman, 1995
- Irene Tinker (ed)., *Persistent Inequalities: Women and World Development*, New York: Oxford University Press, 1990
- Joe Fernandez, *Anggaran Pro Kaum Miskin: Konsep dan Praktik', dalam Anggaran Pro Kaum Miskin: Sebuah Upaya Menyejahterakan Kaum Miskin*, Jakarta: LP3ES, 2009
- Kartasasmita Ginanjar, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pustaka Cidesindo ; Jakarta, 1996
- Kathryn Robinson, *Indonesian Women's Rights, International Feminism and Democratic Change*, Communal/Plural 6, no.2, 1998
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992
- Manisha Desai, *Hope in Hard Times: Women's Empowerment and Human Development*, United Nations Development Programme, Human Development Research Paper 2010/14, July 2010
- Marianne H. Marchand and Jane L. Papart (eds.), *Feminism/Postmodernism/Development*, London and New York: Routledge, 1995
- Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. *Analisis Kualitatif; Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Jakarta, UI Press, 1992
- Mayoux, Linda, *Gender Equity, Equality, and Women's Empowerment. Principle, Development and Framework*, Aga Khan Foundation, 2001
- McLeod, S. (2019, December 29). *Maslow's Hierarchy of Needs*. Diambil kembali dari Simply Psychology: <https://www.simplypsychology.org/maslow.html>
- Moleong L.J. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004
- Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintas pemikiran Mubyarto*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997

- Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, Karangasem: Era Intermedia, 2002
- Muhammad Thalib, *Membangun Ekonomi Keluarga Islam*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2008
- Muhtadi dan Tantan Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013
- Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, Malang: UIN Maliki Press, 2012
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Murtadha, Muthahhari, *Filsafat Perempuan dalam Islam: Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*, Rausyanfikir Institute: Yogyakarta, 2012
- Naila Kabeer, *Resource, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment*, Development and Change, Vol. 30, 1999
- Nanih Mahendrawati, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam ; Dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001
- Nawal el-Sadawi, *Memoar Seorang Dokter Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991
- Nawal el-Sadawi, *Perempuan di Titik Nol*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,1991
- Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993
- Prijono, O.S., Pranarka, A.M.W, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS. Jakarta, 1996
- Qomar, M. N. (2019). Pandangan Al Quran Tentang Perempuan Bekerja (Hikmah Dibalik Surat Al-Qhashas) . *Jurnal Harkat*, 15(1).
- Rebecca Grant and Kathleen Newland (eds.), *Gender and International Relations* Suffolk: Open University Press, 1991
- Ruth Roded, *Kembang Peradaban : Citra Wanita di Mata Para Penulis Biografi Muslim*, Penrj. Ilyas Hasan, Bandung : Mizan, 1995
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*, New York : Anchor Books, 1999

- Siti Muslikati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1995
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 1995
- Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2006
- Soetrisno, Loekman, *Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan. Dalam Dewanta (ed), Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Aditya Medi, 1995
- Sri Najiati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra , *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, Bogor: Wetlands International – 1P, 2005
- Srilatha Batliwala, *Taking the Power out of Empowerment: An Experiential Account*, Development in Practice, vol. 17, no. 4/5, August 2007
- Suparjan & Hemptri Suyatno, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*, Yogyakarta: Aditya Media, 2003
- Supriatna, Tjahya. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung : Humaniora Utama Press, 1997
- Syaefudin, AM.(1997). Filsafat, Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam, JKTTI – No 1-I
- Tomi Hendra, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Quran*, Hikmah Vol. XI, No. 02 Desember 2017
- Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2019
- Tsitsi, *Warisan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994
- Wrihatnolo & Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007
- Yasril Yazid dan Nur Alhidayatillah, *Dakwah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017
- Yin, R. K. *Case Study Research: Design and Methods* (2nd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage, 2002
- Yvonne Y Haddad, *Contemporary Islam and the Challenge of History*, New York: State University of New York, 1980